

**SKRIPSI**

**POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP THAILAND PASCA  
KUDETA MILITER THAILAND PADA TAHUN 2006 DALAM RUANG  
LINGKUP ASEAN**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara**

**Diajukan Oleh :**

**SURYA YUDHA REGIF**

**030906083**

**Dengan**

**DOSEN PEMBIMBING : Indra Kesuma,S.IP,M.Si**

**DOSEN PEMBACA : Warjio,SS,MA**



**DEPARTEMEN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2009**

## DAFTAR ISI

### Halaman

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

DAFTAR ISI

BAB I	: PENDAHULUAN.....	1
1.1.	Latar Belakang Masalah.....	1 – 8
1.2.	Perumusan Masalah.....	8
1.3.	Tujuan Penelitian.....	8 – 9
1.4.	Manfaat Penelitian.....	9
1.5.	Kerangka Teori.....	9 – 10
1.5.1.	Politik Luar Negeri.....	10 – 11
1.5.2.	Analisis Tradisional.....	11
1.5.2.1.	Realisme.....	12 – 13
1.5.2.2.	Neorealis.....	13
1.5.2.3.	Liberalisme.....	13 – 14
1.5.2.4.	Liberalisme Sosiologis.....	14
1.5.2.5.	Liberalisme Interpedensi.....	15 – 16
1.5.2.6.	Ekonomi Politik Internasional.....	16
1.5.3.	Diplomasi.....	17 – 19
1.6.	Metode Penelitian.....	19
1.6.1.	Bentuk Penelitian.....	19 – 20
1.6.2.	Defenisi Konsep.....	20 – 21

	1.6.3. Tehnik Pengumpulan Data.....	21 – 22
	1.6.4. Tehnik Analisa Data.....	22
	1.7. Sistematika Penulisan.....	22 – 23
<b>BAB II</b>	<b>: GAMBARAN UMUM SEJARAH KUDETA DAN PERKEMBANGAN POLITIK PASCA KUDETA MILITER THAILAND .....</b>	<b>24</b>
	A. Latar Belakang Kudeta Militer Thailand .....	24 – 34
	B. Karakteristik Budaya Politik Thailand.....	34 – 39
	C. Situasi Politik Thailand Pasca Kudeta Militer.....	39 – 47
<b>BAB III</b>	<b>: DIPLOMASI DAN ARAH KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP THAILAND PASCA KUDETA MILITER THAILAND PADA TAHUN 2006 DALAM RUANG LINGKUP ASEAN.....</b>	<b>48</b>
	A. Diplomasi dan Politik Luar Negeri Indonesia.....	48 – 59
	B. Diplomasi dan Politik Luar Negeri Indonesia serta tujuan kepentingan nasional di Kawasan ASEAN .....	60 – 75
	C. Diplomasi dan Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Thailand Pasca Kudeta.....	76 – 82

BAB IV	: PENUTUP.....	83
	A. Kesimpulan.....	83 – 87
	B. Saran.....	87 – 89



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Bismillah serta mengucapkan Alhamdulillah skripsi ini dapat saya selesaikan, kata demi kata, kata menjadi kalimat, kalimat menjadi paragraf, paragraf menjadi Bab, dan bab menjadi sebuah buku yang tersusun dalam satu bentuk penelitian yang berbentuk skripsi, dimana saya sebagai peneliti tentunya masih banyak kekurangan dalam penelitian namun diantara kekurangan itu terdapat kecukupan yang banyak dibantu baik itu moril maupun ilmu yang menjadi tambahan ilmu bagi saya dan juga bagi skripsi ini. Untuk itu saya ucapkan rasa terima kasih saya yang begitu dalam kepada :

1. Allah SWT, sebagai unsur “X” yang tak terlihat oleh mata namun terasa begitu dekat berkah dan KaruniaNya kepada hambaNya, sujud dan syukur aku ucapkan untuk kesekian kalinya padaMU ya Rabb. Tak lupa aku haturkan salam dan salawat kepada junjungan semesta alam Rasulullah yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan akan dapat syafaat dari beliau kelak nantinya, Amin.
2. Untuk Special Women in this world, my Mom engkau ibu dan guru paling sabar yang pernah aku kenal gak da kata yang bisa aku katakan namun sujud ananda ditelapak kakimu menjadikan dirimu begitu agung dimata dan hatiku, terimakasih doa – doanya Mak...Juga untuk Abah yang sebentar lagi PELTU infanteri, sudah lama menunggu akhirnya selesai juga ni skripsinya dan cerita kenangan masa lalu tentang perang seroja, menambah ilmu bagi aku tentang sejarah negara ini.
3. Bapak Indra Kesuma Nasution, S.IP, M.Si dan Bapak Warjio SS,MA yang sangat membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Kritik dan sarannya benar – benar sangat bermanfaat.
4. Terimakasih kepada Dekan Fisip USU Bapak Prof. DR. M. Arif Nasution, MA untuk kesempatan yang sudah diberikan.
5. Terimakasih dan Rasa Hormat kepada Bapak Drs. Heri Kusmanto, MA sebagai Ketua Departemen Ilmu Politik. Dosen Wali saya Ibu Dra.



Rosmery Sabri, MA. Dan juga para Dosen Ilmu Politik, Bapak Muryanto Amin, S.Sos,M.Si, Bapak Drs. Zakaria Taher, M.Si, Dll.

6. Para pegawai di Fisip yang selama ini membantu penulis baik itu administrasi maupun teman bicara dan bercanda, Kak Uci, Bang Rusdi, Kak Emma, Kak Adek, dll.
7. Untuk 3 muskeeters...maaf ya bang aku lepaskan segel untuk tameng aku...ya mw bilang apa tapi terima kasih atas perisainya. Moga2 dibalas oleh Allah SWT, Amin...
8. for my bro anywhere...Adikku Anggi, the bro offroad : Yudi (the best bro), bang adek (ckckckckck makin aja), ibenk ( kawin aja benk), musri (jangan dendam ma fisip le), fahme (ada lagi bro ".....")...bwt genk iblis bobby irwansyah / iblis barat ( online aja), koko / iblis utara (awas ketelen biji duren, ntar operasi lagi), xabo / iblis selatan (tidur truss)...disini iblis timur menunggu touring berikutnya...hehehe...
9. Sahabat – sahabat dan teman – temanku, SERMATAR Dwi Anto S (lapor mayor! cepat pulang geng biar kita gerilya malam lagi...hahahaha, kw doain aku, ntar lagi aku nyusul, Amin !) SERMATAR Joshua Tarigan ( pa ya mayor...eee...cepat tamat ajala udah masuk INF aja wehehehe).. for special friends in campus, kalian teman2 yang paling aneh dan kocak hahahahahahaha...(Anak politik 03 + S.Sos nya) Andi (Thank's atas bantuannya dan teman seboncengan kemana saja hahaha), choky (masuk srimulat aja kw chok lucu x kw kurasa), Mimi (bawa kue mochi gak?), prima ( berapa galaksi yang udah kw lewati),Ridho ( dho, kapan ? ), Yos ( masih yang dulunya engkau pal ?), C.Fandi (yang mananya...), Rolan ( rolan kiting), Walid ( wah...apa yang mesti kukatakan padamu, tapi paling tidak kuucapkan terima kasih), Rudi ( hmmm...komunikasi yang membangun ni), Fuad perdana ( tetap radikal ), Yudha (go trus soccernya), Vivi, Veni, Mario, Akhyar, icha, pai, brata, tuti, alween ong, aseng n yang gak tersebut namanya, soalnya lupa genk ..... sorry ..... (tulis aja di titik2 tu).

10. Teman2 di satu atap Fisip Press. Fuad Hasan ( thanks genk, u very nice friend), Bang Khusnul ( makasih atas masukan dan ilmunya, abang masih komandan kami ). Teman2 dikantor sebelah, Hendra M.Nur (buncitnya kurangi), Fajar ( manajer KTP dengan anggota anggiat dkk), Bang arja ( steady aja akh).
11. Anak2 de khinchid hahahahahaha kapan kita maen futsal lagi genk...anak 05 yang usil semoga kalian menerima balasannya kelak ( ichsan, saiful berbadan veni, titin, sandra, si Gulo (kenek), n anak2 06 paling jahil ( Zia, Arifin, Jaffar, Raden)...



Agustus 2009

Surya Yudha Regif

## ABSTRAK

Pada tanggal 19 September 2006 peristiwa politik di Thailand terulang untuk kesekian kalinya, ketika pemerintahan secara sah digulingkan kembali melalui cara inkonstitusional, yaitu dengan cara kudeta oleh pihak militer. Pemerintahan Thaksin Shinawatra yang dipilih kedua kalinya setelah hasil referendum pada tanggal 23 Mei 2006 setelah sebelumnya menjabat sebagai presiden pada pemilihan tahun 1997 digulingkan oleh pihak militer karena kebuntuan politik yang terjadi di Thailand, dimana para elit politik saling berseteru dan berbagai macam kisruh kecurangan politik dan kebijakan Thaksin yang lebih kepada kekerasan dalam menerapkan kebijakan di Thailand selatan serta indikasi keterlibatan Thaksin dan kroni – kroninya di dalam korupsi.

Dengan dukungan dari raja dan elite politik serta kaum intelektual, militer melancarkan kudeta terhadap Thaksin yang ketika itu berada di New York menghadiri sidang majelis umum PBB. Berbagai pendapat disampaikan oleh negara – negara luar tidak terkecuali negara – negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pasca Kudeta Politik Thailand semakin jauh dari Demokrasi, berbagai kekerasan melanda negara Thailand. Aksi – aksi demonstrasi yang saling membalas seakan membelah Thailand menjadi dua bagian yaitu pendukung Raja dan pendukung Thaksin.

Keamanan kawasan sangat dipengaruhi oleh negara – negara anggotanya, konflik yang berlarut – larut dan tidak segera diselesaikan dapat menimbulkan akibat yang buruk bagi negara-negara kawasan. Indonesia mengkhawatirkan munculnya campur tangan dari pihak-pihak lain yang mengharapkan hubungan antar negara ASEAN tidak berjalan dengan baik. Sebagai salah satu negara anggota ASEAN Indonesia perlu bertindak secara baik dan benar untuk mempertahankan kekuatan ASEAN karena peristiwa di Thailand termasuk kedalam ruang lingkup ASEAN yang menyangkut masalah integrasi ASEAN tahun 2015 dan ASEAN Community tahun 2020 serta kepentingan kawasan lainnya disamping itu juga bersinggungan dengan kepentingan nasional Indonesia.



Politik Luar Negeri Indonesia yang menganut sistem bebas dan aktif mempengaruhi langkah – langkah politik luar negeri dan diplomasi di kawasan ASEAN dan khususnya di Thailand pasca Kudeta, dengan langkah – langkah yang diambil Indonesia dapat memajukan ASEAN dan khususnya kepentingan nasional Indonesia.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam Penelitian yang berbentuk skripsi ini peneliti menyusun tentang kebijakan politik luar negeri dan diplomasi Indonesia terhadap Thailand pasca Kudeta Militer Thailand di Negara Thailand pada tahun 2006. Trend demokrasi dewasa ini lebih mengarah kepada trend demokrasi liberal yang menyentuh berbagai aspek kehidupan di setiap negara dapat dilihat dengan munculnya pasar bebas, MNC, dan lain sebagainya. Hal ini pula juga memasuki wilayah Asia Tenggara, sistem politik yang menganut paham demokrasi dengan berbagai latar belakang yang khas dimiliki oleh negara-negara di Asia Tenggara atau ASEAN. Kita dapat ambil contoh di Indonesia yang menganut Demokrasi Pancasila, di Malaysia dan di Thailand menganut paham demokrasi namun yang memiliki peran adalah Raja atau Yang Di Pertuan Agong.

Demokrasi juga mempengaruhi politik luar negeri masing-masing negara, seperti halnya Indonesia. Indonesia yang menganut sistem politik luar negeri bebas dan aktif yakni penjelasan mengenai politik luar negeri bebas dan aktif adalah sebagai berikut :

*Bebas* merupakan dalam pengertian bahwa bangsa Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila.

Surya Yudha Regif : Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Thailand Pasca Kudeta Militer Thailand Pada Tahun 2006 Dalam Ruang Lingkup Asean, 2009.

*Aktif*, merupakan berarti bahwa di dalam menjalankan kebijaksanaan luar negerinya, Indonesia tidak bersikap Pasif-Reaktif atas kejadian-kejadian internasionalnya, melainkan bersikap Aktif.<sup>1</sup>

Hubungan Indonesia di kawasan ASEAN mengalami pasang surut seperti halnya Indonesia – Malaysia, Indonesia – Singapura yang lebih sering terungkap di media cetak maupun tulis, Thailand merupakan negara yang menarik untuk di bahas terutama hubungannya dengan Indonesia. Sejarah hubungan Indonesia-Thailand yang telah dimulai sejak era Sriwijaya dan Majapahit hingga sekarang. Hubungan kedua negara dewasa ini semakin erat dengan meningkatnya kegiatan dan kerjasama, baik pada tingkat G to G, daerah dan P to P contact diberbagai bidang seperti perdagangan, pertanian, pertahanan, energi dan pendidikan.

Dalam sebuah diskusi Dirjen ASPASAF dalam sambutannya menjelaskan tentang hubungan RI-Thailand yang secara umum berjalan dengan baik dan saling menguntungkan. Selain itu, diuraikan juga mengenai berbagai kegiatan dan kerjasama bilateral serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam hubungan kedua negara seperti halnya pemanfaatan kekayaan laut dan masalah perbatasan.

Kemudian dalam presentasinya, Dr. Makarim menyampaikan tentang peluang, tantangan serta hambatan peningkatan hubungan ekonomi RI – Thailand, khususnya di bidang ekonomi seperti di sektor otomotif, energi, dan agro-based industry. Selain itu, Indonesia harus jeli melihat peluang yang ada dalam sektor-sektor ekonomi tersebut agar dapat lebih bermanfaat bagi Indonesia.

---

<sup>1</sup>Kusumaatmadja, mochtar, *Politik Luar Negeri Indonesia dan Pelaksanaannya Dewasa Ini*, Bandung; Alumni.,1983.,Hal.7

Surya Yudha Regif : Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Thailand Pasca Kudeta Militer Thailand Pada Tahun 2006 Dalam Ruang Lingkup Asean, 2009.

Sedangkan Prof. Djohermansyah dalam presentasinya menyampaikan tentang masalah Thailand Selatan dan peran yang diharapkan dari Indonesia dalam kaitan masalah tersebut. Keberhasilan model penyelesaian masalah Aceh meskipun memiliki beragam perbedaan, dimungkinkan untuk diterapkan di Thailand selatan. Perbedaan ini dapat disikapi dengan menawarkan beberapa strategi dan formulasi seperti penyelesaian secara bermartabat dan peningkatan ekonomi dalam paket otonomi khusus.<sup>2</sup>

Dalam perkembangannya ruang lingkup hubungan Indonesia – Thailand memiliki berbagai isu – isu penting seperti yang diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Thailand Kasit Piromya dalam kunjungan di Istana Presiden pada tanggal 11 Februari 2009 antara lain : kerja sama penyelesaian sejumlah isu seperti isu lintas perbatasan, pembajakan, perdagangan manusia, penyelundupan barang, dan masalah kemanusiaan, serta masalah yang berkaitan dengan pasca kudeta militer Thailand yang menjadi isu penting yakni dalam hal demokratisasi, penegakan hukum, tata pemerintahan yang baik, dan juga HAM dari pokok permasalahan ini Thailand menjadikan Indonesia sebagai mitra kerjasama dalam demokrasi dan penyelesaian konflik karena Indonesia dinilai telah berhasil melakukan transformasi di bidang itu seperti yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Thailand Kasit Piromya.<sup>3</sup>

Bagi Indonesia, negara Thailand merupakan negara mitra kerjasama di segala bidang seperti yang menjadi point – point penting yang merupakan maksud dan

---

<sup>2</sup> Pemaparan dan Diskusi pada Roundtable Discussion “Membangun Kerangka Strategis Hubungan Indonesia – Thailand ke Depan: Peluang dan Tantangan” di Ruang Nusantara Deplu tanggal 23 April 2008.

<sup>3</sup> Kunjungan Menteri Luar Negeri Thailand di Istana Presiden pada tanggal 11 Februari 2009.

Surya Yudha Regif : Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Thailand Pasca Kudeta Militer Thailand Pada Tahun 2006 Dalam Ruang Lingkup Asean, 2009.

tujuan berdirinya ASEAN, hubungan kedua negara sangatlah erat dan saling memberikan pengaruh yang besar baik itu perekonomian, perindustrian maupun budaya atau bidang yang lain, dapat dicontohkan seperti tekstil dan suku cadang kendaraan dan yang lebih menjadikan hubungan Indonesia – Thailand lebih dekat yakni ketika pada tahun 1999 Indonesia yang terkena embargo senjata dari negara AS dan Eropa Barat khususnya, tidak terpengaruh. Bahkan ketika AS dan Inggris menyatakan kepada Thailand untuk tidak mengirimkan sisa pesawat tempur yang sudah dibeli Indonesia dari Inggris dan sementara dihangarkan di Thailand namun Thailand tidak mengabaikan pernyataan dari kedua negara tersebut dan mengirimkannya langsung ke Indonesia. Namun masalah yang cukup mengancam yakni kesatuan regional dari ASEAN karena Indonesia juga merupakan bagian ASEAN itu sendiri berbagai konflik perbatasan hingga kasus HAM dan demokratisasi, point – point ini merupakan bagian penting yang tertulis dalam ASEAN Charter berdasarkan ini Indonesia turut berperan aktif dalam situasi di kawasan ASEAN itu sendiri karena hal ini menyangkut pada Integrasi ASEAN pada tahun 2015. Dengan demikian posisi seperti ini Indonesia menjadi negara yang sangat memiliki peranan penting di ASEAN terlebih lagi Indonesia merupakan Founding Father-nya ASEAN. Perubahan politik yang terjadi setiap waktu di internal negara – negara ASEAN perlu segera dicermati karena semua dapat terkait dengan kepentingan dalam negeri dan luar negeri yang be-ruang lingkup kawasan Asia Tenggara. Salah satu negara yang dapat dicermati adalah Thailand karena fenomena politik di negara ini terus saja berlansung.



Thailand memang merupakan negara yang paling banyak diwarnai dengan unjuk rasa dan juga kudeta, yang semuanya selalu berujung pada pergantian pihak berkuasa yang ada di sana. Kudeta itu terus terjadi bahkan sejak tahun 1932 sampai sekarang. Kudeta yang terus terjadi itu merupakan suatu tanda bahwa pemerintahan yang selama berlangsung di Thailand tidak pernah tepat. Pemerintahan yang korup ataupun peraturan perundang-undangan yang tidak beres mengakibatkan buruknya pemerintahan Thailand. Semua kudeta yang terjadi tersebut selalu memunculkan dugaan kalau militer selalu melatarbelakanginya. Dari 70 persen analisa yang ada memang ditemukan dugaan bahwa militer bermain dibelakang semuanya. Keterlibatan militer Thailand di semua kudeta itu memang tidak dapat dipungkiri lagi.

Selama ini petinggi militer Thailand selalu memainkan peran sangat penting ditiap peristiwa kudeta dan unjuk rasa yang terjadi. Sejak awal terjadinya kudeta di Thailand sudah beberapa kali militer juga melakukan kudeta, baik itu oleh semua angkatan yang ada atau hanya sebagian saja. Tetapi itu sudah cukup efektif untuk menggulingkan pemerintahan sementara di Thailand. Panglima Militer selaku pimpinan tertinggi militer Thailand benar-benar memiliki kekuasaan mutlak atas militer, sehingga menyebabkan kemungkinan terjadinya kudeta sangat terbuka. Militer melatarbelakangi hampir semua kudeta yang terjadi di Thailand juga dipastikan ada sebabnya. Selama ini sipil dinilai belum bisa untuk memimpin Thailand, selalu timbul pemerintahan yang korup apabila dipimpin oleh pemerintah sipil.

Sementara itu apabila militer diberi kekuasaan penuh di Thailand maka akan tercipta pemerintahan rezim, yang mengakibatkan sistem demokrasi tidak bisa berjalan apabila berdekatan dengan sistem militer. Rezim militer apabila berkuasa selalu mendapat tekanan asing untuk segera menyerahkan kekuasaannya kepada sipil, ini dikarenakan untuk menghindari hilangnya sistem demokrasi yang ada dan juga pelanggaran terhadap human rights. Hal-hal tersebut diatas yang menyebabkan tekanan dunia internasional agar supaya militer menyerahkan kekuasaannya kepada sipil dan tidak berkuasa terlalu lama di Thailand. Pemerintahan sipil yang pernah terjadi di Thailand, sampai dengan pemerintahan Thaksin Sinawatra, tidak bisa dijadikan sebagai acuan pemerintahan yang kredibilitas bagi Thailand. Pemerintahan sipil yang pernah ada selama ini selalu mengarah kepada pola pemerintahan sipil yang korup dan juga dipandang lebih sewenang-wenang daripada pemerintahan militer. Pemerintahan PM Samak Sundaravej sebagai pemerintahan sipil sekarang di Thailand telah mengalami mosi tidak percaya dari rakyat karena hendak mengamandemen konstitusi yang sudah ada.

Telah banyak bukti bahwa pemerintahan sipil di Thailand tidak pernah berhasil dalam memimpin rakyat Thailand. Hal ini menyebabkan militer berpikir untuk kembali memegang tampuk pemerintahan di Thailand, militer menganggap sipil belum layak dan pantas untuk memimpin. Ketidakseimbangan antara sipil-militer ini seringkali terjadi di Thailand, menyebabkan terjadinya kesenjangan pemikiran dan ideologis antara sipil-militer. Dunia internasional kini membutuhkan era kepemimpinan baru di Thailand, dunia internasional membutuhkan jawaban baru

siapa yang harus memimpin Thailand. Pemerintahan sipil sudah terbukti belum

Surya Yudha Regif : Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Thailand Pasca Kudeta Militer Thailand Pada Tahun 2006 Dalam Ruang Lingkup Asean, 2009.

sanggup untuk memimpin Thailand tanpa adanya korupsi dan juga penyimpangan-penyimpangan lain yang biasa terjadi pada pemerintahan sipil. Pemerintahan militer dianggap masih cocok untuk memimpin Thailand, tetapi pemerintahan militer yang terlalu lama juga dianggap terlalu cocok untuk memimpin Thailand. Pemerintahan militer yang terlalu lama bisa menimbulkan suatu pemerintahan rezim dan dapat mengganggu proses demokratisasi yang ada.

Sebagai salah satu anggota ASEAN, Thailand merupakan suatu negara yang dipandang cukup baik itu dari segi ekonomi maupun politik. Untuk itu diharapkan konflik yang terjadi di Thailand segera dapat diselesaikan dengan segera. Karena, apabila konflik tersebut terjadi terlalu lama dapat menimbulkan akibat yang buruk bagi negara-negara kawasan. Dan juga dikhawatirkan munculnya campur tangan dari pihak-pihak lain yang mengharapakan hubungan antar negara ASEAN tidak berjalan dengan baik. Melihat segala macam hal-hal yang dapat terjadi dari konflik internal yang terjadi di diharapkan segera ditemukan solusi untuk hal tersebut. Diharapkan segera terbentuk pemerintahan yang stabil dan baik yang segera dapat berjalan di Thailand. Sehingga kerjasama-kerjasama bilateral dan regional yang selama ini sudah ada dapat terjaga dengan baik. Ketidakstabilan politik dalam negeri di Thailand berarti juga ketidakstabilan bagi kawasan, karena bisa mengancam masalah pertahanan dan keamanan bagi kawasan. Sementara kestabilan politik di Thailand berarti kestabilan juga bagi kawasan, baik itu kawasan regional maupun internasional. Pentingnya hubungan yang baik antara negara – negara se-kawasan menciptakan politik luar negeri yang produktif hingga dapat membantu permasalahan yang rumit.

Fenomena yang terjadi di Thailand bersinggungan dengan apa yang telah diratifikasi Surya Yudha Regif : Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Thailand Pasca Kudeta Militer Thailand Pada Tahun 2006 Dalam Ruang Lingkup Asean, 2009.

dalam piagam ASEAN, Indonesia yang memiliki peranan penting di kawasan Asia Tenggara menyikapi keadaan ini dalam bentuk politik luar negeri diminta atau tidak oleh negara – negara yang bersangkutan. Berbagai wadah dapat dilaksanakan seperti komunikasi antara G to G, dan lebih formal lagi dapat dituangkan dalam wadah ASEAN regional Forum ( ARF ), adalah Sebagai wadah dan sarana saling tukar pandangan dan informasi secara terbuka mengenai berbagai masalah, mulai dari politik, keamanan, lingkungan hidup, dst. Secara khusus ARF ditunjukan untuk bisa bersama-sama memecahkan masalah keamanan baik regional,maupun internasional.

Ketertarikan penulis ingin meneliti dan mempelajari lebih dalam bagaimana Politik Luar Negeri Indonesia yang Bebas dan Aktif melaksanakan diplomasi terhadap proses demokrasi di Thailand, Pasca Kudeta Militer di Negeri Gajah Putih itu yang mana Perdana Menteri yang konstitusional dapat digulingkan dengan cara inkonstitusional. Dengan demikian, dari uraian diatas, penulis memilih judul **Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Thailand Pasca Kudeta Militer Thailand pada Tahun 2006 Dalam Ruang Lingkup ASEAN.**

## **1.2. Perumusan Masalah**

Dalam melakukan penelitian ini, perlu adanya pelaksanaan pembatasan masalah dan dilaksanakan dengan terarah dan tepat sasaran, maka permasalahan harus dirumuskan dengan dengan jelas. Berdasarkan judul penelitian di atas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah :“ *Bagaimana Diplomasi dan Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Thailand Pasca Kudeta Militer Thailand pada Tahun 2006 Dalam Ruang Lingkup ASEAN ?*“

Surya Yudha Regif : Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Thailand Pasca Kudeta Militer Thailand Pada Tahun 2006 Dalam Ruang Lingkup Asean, 2009.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui Diploması Politik Luar Negeri Indonesia
2. Mengetahui Politik Dalam Negeri Thailand Pasca Kudeta
3. Menemukan dan menjelaskan analisis Diploması Politik Luar negeri Indonesia terhadap Thailand pasca Kudeta Militer Thailand di Negara Thailand Dalam Ruang Lingkup ASEAN.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui diplomasi politik luar negeri Indonesia terhadap Thailand dan pengaruhnya terhadap ASEAN serta Indonesia khususnya pasca kudeta militer di negara Thailand tersebut dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan kemampuan berfikir secara akademis dan ilmiah dalam memandang politik luar negeri Indonesia sebagai bentuk kebijakan yang memberikan kekuatan, kemampuan, kepentingan dan pengaruh di dunia internasional.
2. Menambah Khasanah Ilmu Pengetahuan terutama di bidang politik, khususnya mengenai masalah Politik Luar Negeri.
3. Sebagai literature yang baru bagi daftar bagi kepustakaan untuk yang tertarik dan konsentrasi dengan bidang dan permasalahan yang serupa.
4. Belajar menghargai sejumlah kesulitan yang terlibat dalam penjelasan kebijakan luar negeri dan politik internasional.



5. Mengasah kemampuan penulis di dalam menyusun sebuah tulisan ilmiah.

## **1.5. Kerangka Teori**

Di dalam menyusun sebuah tulisan ilmiah, maka kerangka teori merupakan bagian yang sangat penting, karena di dalam kerangka teori akan dimuat teori-teori yang relevan dalam menjelaskan permasalahan yang sedang diteliti. Kerangka teori ini kemudian akan digunakan sebagai landasan berfikir atau titik tolak dalam penelitian. Oleh karena itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan diri dari sudut mana masalah penelitian akan disoroti.<sup>4</sup>

Dalam ilmu sosial, teori memiliki dua fungsi. Pertama, teori berfungsi secara mudah bagi peneliti untuk mengorganisasikan data. Kedua, teori memungkinkan peneliti mengembangkan prediksi bagi situasi-situasi yang belum ada datanya. Prediksi membawa kepada hipotesis yang menjadikan tindakan penelitian lebih terarah, efisien, dan sistemik. Teori digunakan untuk menyusun konsep-konsep dan fakta-fakta ke dalam suatu pola yang logis dan untuk memprediksikan hasil penelitian yang akan datang.<sup>5</sup>

### **1.5.1. Politik Luar Negeri**

Pengertian pada umumnya Politik Luar Negeri merupakan pengertian mengenai kekuatan-kekuatan yang menentukan hubungan politik antar negara, dan

---

<sup>4</sup> Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta; Gajah Mada University Press, 1995 Hal.39-40.

<sup>5</sup> Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1998, Hal.39-40.

Surya Yudha Regif : *Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Thailand Pasca Kudeta Militer Thailand Pada Tahun 2006 Dalam Ruang Lingkup Asean*, 2009.

cara-cara tindakan kekuatan antara satu dengan yang lainnya dan hubungan politik internasional dan lembaga-lembaganya.<sup>6</sup>

Sebagian besar studi mengenai politik Luar Negeri pada kenyataannya telah menjadi studi mengenai kebijakan luar negeri. Studi ini memusatkan perhatian pada deskripsi kepentingan, tindakan dan unsur kekuatan negara.

Politik Luar Negeri dari perspektif masing-masing negara, dan bukan dari keadaan sistem tempat system itu berada. Penjelasan perilaku negara dengan tidak hanya mengacu pada lingkungan eksternal (sistem) tetapi terutama pada keadaan dalam negeri yang mempengaruhi pengambilan kebijakan. perang, aliansi, imperialisme, manuver diplomatik, isolasi dan banyak tujuan tindakan diplomatic dapat dipandang sebagai hasil tekanan politik dalam negeri, ideology nasional, opini public, atau kebutuhan sosial dan ekonomi.<sup>7</sup>

### **1.5.2. Analisis Tradisional**

Berbicara tentang Politik Luar Negeri, ada beberapa analisis yang dapat dijadikan fokus penelitian yang salah satunya adalah analisis Tradisional yaitu merupakan kajian mengenai berbagai kebijakan luar negeri, masalah-masalah internasional tertentu dengan mengutamakan deskripsi. Tujuan utama untuk membuat laporan dan analisis mutakhir mengenai masalah politik luar negeri dan memikirkan

---

<sup>6</sup> Bona .S, Frans, *Ilmu Politik Internasional*, Jakarta;Ghalia Indonesia.,1984,Hal.,53.

<sup>7</sup> Holsti K.J, *Politik Internasional (kerangka untuk analisis)* Edisi keempat Jilid I.,Jakarta ; Erlangga,1988.,Hal.17

Surya Yudha Regif : *Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Thailand Pasca Kudeta Militer Thailand Pada Tahun 2006 Dalam Ruang Lingkup Asean*, 2009.

sumber-sumber dan hasil berbagai alternatif kebijakan bagi negara-negara tertentu atau Organisasi Internasional.<sup>8</sup>

### 1.5.2.1 Realisme

Ide dan gagasan dasar kaum Realis adalah

1. pandangan pesimis atas sifat manusia.
2. keyakinan bahwa hubungan Internasional pada dasarnya konfliktual dan bahwa konflik internasional pada akhirnya diselesaikan melalui perang.
3. menjunjung tinggi nilai-nilai keamanan nasional dan kelangsungan hidup Negara.
4. skeptisisme dasar bahwa terdapat kemajuan dalam politik internasional seperti yang terjadi dalam kehidupan politik domestik.

Kaum realis berjalan dengan asumsi dasar bahwa politik dunia berkembang dalam anarki internasional yaitu system tanpa adanya kekuasaan yang berlebihan, tidak ada pemerintahan dunia. Negara adalah actor utama dalam politik dunia. Hubungan internasional khususnya merupakan hubungan Negara-negara. Semua aktor lain dalam politik dunia selain Negara seperti individu-individu, organisasi internasional, LSM dianggap kurang penting atau tidak penting. Inti terpenting dari kebijakan luar negeri adalah untuk membentuk dan mempertahankan kepentingan negara dalam politik dunia. Hubungan internasional dipahami oleh kaum realis terutama sebagai perjuangan di antara Negara-negara berkekuatan besar untuk

---

<sup>8</sup> Holsti K.J, *Politik Internasional*, (ibid),Hal.,9

Surya Yudha Regif : Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Thailand Pasca Kudeta Militer Thailand Pada Tahun 2006 Dalam Ruang Lingkup Asean, 2009.

dominasi dan keamanan. dasar normatif Realisme adalah keamanan nasional dan kelangsungan hidup negara bahwa ini merupakan nilai-nilai yang menggerakkan doktrin kaum realis. Negara dipandang sebagai esensial bagi kehidupan warga negaranya bahwa tanpa negara tidak adanya alat-alat dan kondisi-kondisi keamanan dan memajukan kesejahteraan (Hobbes 1946:82). Kepentingan nasional adalah wasit terakhir dalam menentukan kebijakan luar negeri.<sup>9</sup>

Kaum realis berpendapat bahwa politik harus dimainkan dalam corak yang realistik. Bagi mereka, power merupakan esensi politik. Pendekatan ini bersifat normatif ( yaitu bersifat preskriptif) yang menganjurkan kepada para pemimpin untuk menggunakan tehnik-tehnik yang berorientasi pada power, dan dalam hal mengejar kepentingan, pengejaran kepentingan harus ditempatkan sebagai prioritas pertama.<sup>10</sup>

#### **1.5.2.2. NeoRealis**

Kenneth Waltz (1979) , dalam pandangannya teori HI yang terbaik adalah memfokuskan pada struktur sistem, pada unit-unitnya yang berinteraksi dan pada kesinambungan dan perubahan sistem.

---

<sup>9</sup> Sorensen,Georg,*Pengantar Studi Hubungan Internasional*,Yogyakarta;Pustaka Pelajar, 2005, Hal.88-89.

<sup>10</sup> Soeprapto,R.,*Hubungan Internasional*, Jakarta;PT.Raja Grafindo Permata, 1997, Hal.28.

Surya Yudha Regif : Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Thailand Pasca Kudeta Militer Thailand Pada Tahun 2006 Dalam Ruang Lingkup Asean, 2009.

### **1.5.2.3. Liberalisme**

Asumsi-asumsi dasar Liberal adalah

1. Pandangan positif terhadap manusia.
2. Keyakinan bahwa hubungan Internasional dapat bersifat kooperatif daripada konfliktual.
3. percaya terhadap kemajuan.

Proses modernisasi didorong oleh revolusi intelektual kaum liberal yang memiliki keyakinan besar terhadap akal pikiran dan rasionalitas manusia. Kaum liberal umumnya mengambil pandangan positif tentang sifat manusia. Mereka memiliki keyakinan besar terhadap akal pikiran manusia dan mereka yakin bahwa prinsip rasional dapat dipakai pada masalah-masalah internasional. Individu selalu mementingkan diri sendiri dan bersaing untuk sesuatu hal, mereka percaya individu-individu memiliki banyak kepentingan dan dengan demikian dapat terlibat dalam aksi sosial yang kolaboratif dan kooperatif, baik domestik maupun internasional, yang menghasilkan manfaat besar bagi setiap orang di dalam negeri maupun luar negeri. Keyakinan terhadap kemajuan adalah asumsi dasar liberal.<sup>11</sup>

### **1.5.2.4. Liberalisme Sosiologis**

Kaum liberal Sosiologis memandang HI bukan hanya hubungan negara-negara tetapi juga tentang hubungan Transnasional, yaitu hubungan antara masyarakat, kelompok-kelompok, dan organisasi-organisasi yang berasal dari negara yang berbeda atau dengan istilah “Pluralisme”.

---

<sup>11</sup> Sorensen Georg, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, (op cit), Hal.,140-141

Surya Yudha Regif : Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Thailand Pasca Kudeta Militer Thailand Pada Tahun 2006 Dalam Ruang Lingkup Asean, 2009.



### **1.5.2.5. Liberalisme Interdependensi**

Kaum Liberal Interdependensi berpendapat bahwa pembagian tenaga kerja yang tinggi dalam perekonomian Internasional meningkatkan interdependensi antar negara, dan hal itu menekan dan mengurangi konflik kekerasan antar negara.

### **Masyarakat Internasional**

Asumsi Dasar Masyarakat Internasional adalah

1. pernyataan bahwa hubungan internasional adalah cabang dari hubungan manusia yang pada intinya merupakan nilai-nilai dasar seperti kemerdekaan, keamanan, ketertiban dan keadilan.
2. pendekatan yang berfokus pada manusia dan menginterpretasikan pemikiran-pemikiran dan aksi-aksi dari masyarakat dalam hubungan internasional.
3. penerimaan premis anarki internasional.

Pendekatan ini berupaya menghindari pilihan sulit antara

1. egoisme dan konflik negara.
2. keinginan baik manusia dan kerjasama yang dimunculkan oleh perdebatan antara realisme dan liberalisme.

Tradisi Masyarakat Internasional menganggap hubungan internasional sebagai suatu “masyarakat” negara dimana aktor utamanya adalah negarawan yang ahli dalam praktek ketatanegaraan. Ketatanegaraan dipandang sebagai aktivitas manusia yang sangat penting yang mencakup kebijakan luar negeri, kebijakan militer, kebijakan perdagangan, pengakuan politik, komunikasi diplomatik, pengumpulan data intelejen,

dan mata-mata, membentuk dan bergabung dengan aliansi militer, mengancam atau

Surya Yudha Regif : Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Thailand Pasca Kudeta Militer Thailand Pada Tahun 2006 Dalam Ruang Lingkup Asean, 2009.

terlibat dalam penggunaan kekuatan bersenjata, bernegosiasi dan menandatangani perjanjian perdamaian, memasuki perjanjian perdagangan, bergabung dan berpartisipasi dalam organisasi internasional, dan terlibat dalam kontak, interaksi, transaksi dan pertukaran internasional yang tak terhitung. Inti pendekatan Masyarakat Internasional adalah Negara-negara dianggap sebagai organisasi manusia.<sup>12</sup>

#### **1.5.2.6. Ekonomi Politik Internasional**

Teori-teori tersebut melihat

1. hubungan yang tepat antara politik dan ekonomi.
2. pembangunan dan kelatarbelakangan dunia ketiga.
3. sifat dan luasnya globalisasi ekonomi.

Pasar modern di dasarkan pada aturan-aturan politik, regulasi dan aturan politik menyatakan kerangka kerja yang dengannya pasar berfungsi. Pada saat bersamaan, kekuatan ekonomi merupakan basis bagi kekuatan politik. Jika ekonomi adalah kekuatan, keduanya berinteraksi dalam cara yang rumit dan memusingkan ( Gilpin 1987 ). Hal ini merupakan hubungan kompleks dalam konteks internasional antara politik dan ekonomi, antara negara dan pasar, yang merupakan inti dari EPI. EPI melihat kepada isu-isu tentang kekayaan dan kemiskinan, tentang siapa mendapatkan apa dalam sistem internasional.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Sorensen, Georg, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, (op cit), Hal., 184-185.

<sup>13</sup> Sorensen, Georg, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, (op cit), Hal., 228.

Surya Yudha Regif : Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Thailand Pasca Kudeta Militer Thailand Pada Tahun 2006 Dalam Ruang Lingkup Asean, 2009.

### 1.5.2. Diplomasi

Fungsi utama diplomasi adalah melindungi dan memajukan kepentingan nasional. Beberapa pengertian diplomasi antara lain yang diungkapkan oleh beberapa ahli seperti :

1. Menurut Sumaryo Suryokusumo, Diplomasi adalah kegiatan politik dan merupakan bagian dari kegiatan internasional yang saling berpengaruh dan kompleks, dengan melibatkan pemerintah dan organisasi internasional untuk mencapai tujuan-tujuannya, melalui perwakilan diplomatik atau organ – organ lainnya.
2. Menurut Sir Victor Wellesley, Diplomasi bukan suatu kebijakan, melainkan upaya untuk memberikan pengaruh terhadap kebijakan atau pandangan negara lain.
3. Menurut Nicholas, Diplomasi yang kualitas dan keberhasilan politik luar negeri tidak tergantung pada tujuan yang abstrak melainkan pada pelaksanaan diplomasi yang nyata melalui berbagai cara, yaitu dengan menyebarluaskan kebijakan yang diambil, menjelaskannya dan merundingkan persetujuan – persetujuan yang menjamin keamanan negara, baik perang maupun damai.<sup>14</sup>

Maka diplomasi dapat dilihat sebagai usaha untuk menciptakan kesesuaian dan mendamaikan perbedaan – perbedaan dengan melakukan mediasi dan negosiasi antar negara dengan baik dan cerdas dengan berlandaskan kepentingan negara dan

---

<sup>14</sup> Syahmin, *Hukum Diplomatik*, Jakarta; Rajawali Pres, 2008, Hal.,6.

Surya Yudha Regif : *Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Thailand Pasca Kudeta Militer Thailand Pada Tahun 2006 Dalam Ruang Lingkup Asean*, 2009.

nasional yang masuk dalam politik luar negeri. Dalam mengatasi suatu persoalan maka harus dicegah masuknya posisi yang terdesak, karena timbulnya masalah lain yang berkaitan. Untuk meningkatkan dan mempercepat, proses pengambilan keputusan, beberapa persiapan perlu diadakan terlebih dahulu dalam hal :

- a. Kemampuan untuk mengenal dan menganalisis masalah-masalah penting dalam politik luar negeri.
- b. Kemampuan untuk menentukan masalah mana yang lebih penting daripada yang lain.
- c. Kemampuan untuk menentukan alternatif-alternatif terhadap kebijaksanaan yang telah dirumuskan.
- d. Kemampuan untuk mengaitkan analisis-analisis kebijaksanaan dengan sumber-sumber management (man, money, material), agar sumber-sumber ini selalu tersedia dalam kita melaksanakan politik dan hubungan luar negeri.

Berbagai macam keputusan mengenai politik luar negeri dapat digolong-golongkan berdasarkan:

1. Sifat keputusan : a). rutin, b). penting, c). kritis.
2. Isu seperti keputusan mengenai isu militer, politik, ekonomi, lingkungan, tehnik, kebudayaan, humaniter dan lain-lainnya.
3. Kriteria Geografis seperti hubungan Timur-Barat, Utara-Selatan dan sebagainya.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Soeprapto,R, *Hubungan Internasional*, (op cit) Hal.,188.

Ada 5 ( lima ) variabel menurut pendapat Rosenau, Coulombis, dan Wolfe yang berpengaruh terhadap pembuatan politik luar negeri antara lain:

1. Variabel Ideosinkretik, hal ini berkaitan dengan karakteristik psikologis para pemimpin serta pembuat keputusan, demikian juga pelaksana politik mempunyai pengaruh atas hasil politik.
2. Variabel Peranan, hal ini lebih operatif dalam sistem demokrasi yang kompetitif karena perilaku decision maker lebih transparan dan terbuka terhadap kritikan.
3. Variabel Birokratis, hal ini merefleksikan kepentingan-kepentingan biro-biro pemerintah, dinas-dinas militer.
4. Variabel Nasional, hal ini berkaitan dengan atribut nasional yang mempengaruhi hasil politik luar negeri.<sup>16</sup>

## **1.6. Metode Penelitian**

Metodologi merupakan suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha yang dilakukan dengan metode – metode ilmiah.<sup>17</sup>

### **1.6.1. Bentuk Penelitian**

Untuk mendapatkan data dan keterangan yang mendukung penulisan ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

---

<sup>16</sup> Soeprapto, R., *Hubungan Internasional*, (op cit), Hal., 189-192.

<sup>17</sup> Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, Jilid I Cetakan ke XXI, 1989, Hal., 4.  
Surya Yudha Regif : *Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Thailand Pasca Kudeta Militer Thailand Pada Tahun 2006 Dalam Ruang Lingkup Asean*, 2009.



Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dan pendekatan kualitatif dapat diartikan sebagai pendekatan yang dapat menghasilkan data, tulisan dan informasi yang didapat dari apa yang dilakukan selama penelitian.

Penelitian deskriptif ini juga digunakan sebagai suatu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan keadaan objek penelitian secara mendalam saat sekarang, dan tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat suatu deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan fenomena yang diselidiki.

### **1.6.2. Defenisi Konsep**

Konsep adalah suatu istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok ataupun individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial.<sup>18</sup>

Berikut beberapa konsep beserta defenisinya yang digunakan didalam penelitian ini yang berfungsi untuk memberikan batasan yang tepat terkait dengan fenomena yang akan diteliti:

#### **1. Politik Luar Negeri**

Politik luar negeri adalah politik untuk mencapai tujuan nasional dengan menggunakan segala kekuasaan dan kemampuan yang ada interaksi antara tujuan nasional dengan sumber-sumber yang digunakan adalah subjek yang kekal dari ilmu kenegaraan dan merupakan suatu proses melalui tindakan atau isyarat untuk mengubah atau mendukung perilaku negara lain, dengan kata lain kemampuan suatu

---

<sup>18</sup> Singarimbun, M., *Metodologi penelitian survey*., Jakarta; LP3ES., 1995., Hal.33

Surya Yudha Regif : Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Thailand Pasca Kudeta Militer Thailand Pada Tahun 2006 Dalam Ruang Lingkup Asean, 2009.

negara untuk mempengaruhi perilaku negara yang lain. Politik luar negeri yang dimaksudkan disini adalah tindakan berupa kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Thailand pasca Kudeta pada tahun 2006.

### **1.1.Diplomasi**

Diplomasi adalah kegiatan politik dan merupakan bagian dari kegiatan internasional yang saling berpengaruh dan kompleks, dengan melibatkan pemerintah dan organisasi internasional untuk mencapai tujuan-tujuannya, melalui perwakilan diplomatik atau organ – organ lainnya.

#### **1.1.1. Diplomasi Intermestik**

Diplomasi yang menyuarkan kepentingan nasional ke masyarakat internasional dan komunikasi ke dalam negeri bertujuan untuk membentengi kepentingan nasional serta mengambil langkah antisipasi dalam menghadapi arus tuntutan dunia.<sup>19</sup>

### **2.Kudeta**

Kudeta atau Coup d'etat atau Pronunciaminto yaitu perebutan kekuasaan dengan menggunakan kekuatan militer.

#### **2.1.Kudeta Militer di Thailand pada tahun 2006**

Kudeta Militer yang terjadi di Thailand pada tahun 2006 dengan menggulingkan kedudukan PM Thailand yang terpilih Thaksin Sinawatra dengan dukungan dari raja.

### **1.6.3. Tehnik Pengumpulan Data**

---

<sup>19</sup> Lihat Penjelasan Umum UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Surya Yudha Regif : Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Thailand Pasca Kudeta Militer Thailand Pada Tahun 2006 Dalam Ruang Lingkup Asean, 2009.

Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik pengumpulan data kepustakaan, dengan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin yang berkaitan dengan judul dan permasalahan penelitian dari berbagai literatur, seperti buku, situs internet, jurnal, laporan, artikel, dan bentuk literatur lainnya yang terkait.

#### **1.6.4. Tehnik Analisis Data**

Adapun tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik analisis data kualitatif, dimana tehnik ini melakukan analisa atas masalah yang ada sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang objek yang akan diteliti dan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Defenisi Konsep, Defenisi Operasional, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

#### **BAB II :SEJARAH DAN PERKEMBANGAN POLITIK PASCA KUDETA MILITER THAILAND**

Bab ini membahas tentang sejarah kudeta militer Thailand dengan fokus tetap kepada kudeta militer Thailand di tahun 2006 dan perkembangan politik pasca kudeta pada tahun 2006,

**BAB III : DIPLOMASI DAN ARAH KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DI ASEAN DAN PASCA KUDETA MILITER THAILAND PADA TAHUN 2006 DALAM RUANG LINGKUP ASEAN.**

Bab ini membahas tentang diplomasi maupun kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia yang bersifat implikatif pada hubungan kedua negara dengan tidak melepaskan politik bebas aktif pada ruang lingkup ASEAN.

**BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisikan tentang kesimpulan penulis terhadap hasil yang didapat dari penelitian, serta saran dari penulis terkait masalah yang diteliti.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM SEJARAH KUDETA DAN PERKEMBANGAN POLITIK PASCA KUDETA MILITER THAILAND**

#### **A. Latar Belakang Kudeta Militer Thailand**

Salah satu negara yang memiliki keunikan politik di wilayah ASEAN adalah Thailand dimana Negara ini terus dilanda gejolak politik terutama pemindahan kekuasaan. Thailand menempati wilayah seluas 513.115 km<sup>2</sup> dan terletak di daratan Asia Tenggara. Bentuk Pemerintahan yang Monarki Konstitusional dibentuk pada tahun 1932 ketika sebuah kudeta mengakhiri suatu deretan diktator yang berurutan. Raja yang selanjutnya, Rama VII, menyetujui penghapusan monarki absolute dan menggantikannya dengan suatu sistem konstitusi di sepanjang garis-garis system demokratik barat. Raja yang sekarang, Raja Bhumibol Adulyadej, adalah raja kesembilan dari Dinasti Chakri.

Pemerintah Thailand digambarkan sebagai monarki rakyat. Ia mulai dengan penghormatan yang dalam dari rakyatnya bergaul dengan rakyatnya kapan pun ada kesempatan. Ia melibatkan dirinya dengan berbagai proyek kesejahteraan rakyatnya seperti dari pengganti panen untuk opium di distrik utara sampai proyek-proyek drainase dan reklamasi di selatan, dari proyek-proyek konservasi air dan irigasi di barat laut sampai pertanian kooperatif di daratan tengah. Kerajaan Thai suatu kekuatan penyatu di negara tersebut.



Thailand selalu diperintah oleh diktator, tetapi sejak monarki absolute digantikan dengan demokrasi parlementer, masyarakatnya harus menyesuaikan dengan lambat terhadap sistem seperti itu. Partai-partai politik cenderung menjamur sebelum pemilihan berlansung, dan segera memudar setelah mereka tidak mencapai keberhasilan dalam pemilihan tersebut. Koalisi-koalisi telah menandai berbagai pemerintahan yang terbentuk selama puluhan tahun ini. Kudeta dan counter kudeta yang telah berkali-kali terjadi sejak tahun 1932, juga merupakan hal yang umum terjadi. Sejak tahun 1932 telah terjadi 15 kali pemilihan dan juga konstitusi. Partai-partai cenderung terbentuk di sekitar pribadi-pribadi ketimbang sepanjang garis-garis ideologi atau program-program.<sup>20</sup>

Sejak Tahun 1932 Budaya Kudeta telah terjadi, Thailand merupakan sebuah Negara yang mempunyai khas tersendiri dalam sejarah perjalanan negaranya. Aktifitas-aktifitas kudeta kerap kali mewarnai dunia perpolitikan di Thailand. Setidaknya sudah 23 kali dalam 74 tahun terakhir militer melakukan kudeta. Dan dapat dikatakan militer Thailand memiliki rekor yang sangat tinggi dalam urusan kudeta, yang seringkali berakhir sukses sekaligus tercatat beberapakali gagal yaitu pada masa pemerintahan Prem Tinsulnonda yang juga merupakan Eks Kepala Militer dengan percobaan kudeta 2 kali namun tetap survive.

Intervensi militer sebenarnya merupakan bentuk lain dari istilah keterlibatan militer dalam politik, pendorong lain juga bisa berasal dari dalam tubuh militer sendiri, yakni munculnya berbagai kekuatan yang ditafsirkan dapat menghambat

---

<sup>20</sup> Gill, Ranjit., *ASEAN.*, Op.cit. (hal.148-149).

Surya Yudha Regif : Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Thailand Pasca Kudeta Militer Thailand Pada Tahun 2006 Dalam Ruang Lingkup Asean, 2009.

perkembangan organisasi militer. Maurice Duverger mengkriterikan sistem seperti ini kedalam sistem Otokrasi yaitu :

Perebutan Kekuasaan : adanya perebutan kekuasaan oleh seseorang dengan kelompoknya dari kelompok penguasa yang lama. Biasanya tidak lama setelah adanya perebutan kekuasaan ini, akan diadakan cara-cara yang sah menurut hukum untuk mengesahkan kekuasaannya tadi. Dengan kata lain diadakanlah legitimasi kekuasaan yang sah secara yuridis, sebab kekuasaan tadi diperolehnya dengan cara revolusi, coup d'etat, pronunciaminto.

Definisi pronunciaminto ialah cara yang seperti kudeta namun menggunakan kekuatan militer untuk menggulingkan pemerintahan yang lama.<sup>21</sup> Selama 15 tahun (1991-2006) Thailand berada dalam alam demokrasi yang di tandainya dengan menguatnya system pemerintahan sipil dan tidak adanya intervensi militer untuk menumbangkan pemerintahan, namun apa yang terjadi pada tanggal 19 september 2006 merupakan peristiwa yang cukup mengejutkan di saat demokrasi menjadi trend di kawasan Asia, Thailand memunculkan kembali politik kudeta yang telah lama ditinggalkan. Pemerintahan Thaksin Shinawatra yang digulingkan oleh militer atas dukungan dari Raja Bhumibol Adulyadej, yang ketika itu Thaksin Shinawatra berada di New York, Amerika Serikat untuk menghadiri sidang majelis umum perserikatan bangsa-bangsa (PBB). Apa yang yang menyebabkan Militer mengambil alih kekuasaan hal ini disebabkan akibat dari ketimpangan ekonomi yang diakibatkan oleh penyalahgunaan kekuasaan, Thaksin lebih dianggap sebagai pemimpin yang berkarakteristik khas pedagang, korupsi, kronisme, nepotisme dan ini menjadi faktor

---

<sup>21</sup> Pakpahan, Mukhtar., *Ilmu Negara dan Politik.*, Jakarta; Bumi Intitama Sejahtera., 2006., Hal. 102

Surya Yudha Regif : Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Thailand Pasca Kudeta Militer Thailand Pada Tahun 2006 Dalam Ruang Lingkup Asean, 2009.

kebencian khususnya militer, pelayan sipil, teknokrat, intelektual liberal, pengacara dan aktivis LSM.

Kepopuleran Thaksin tidak diiringi oleh kepintaran politiknya dalam merebut hati Raja, sikap arogan yang dimilikinya dengan menyingkirkan orang-orang yang dekat dengan raja yang tidak sependangan dengan dirinya dan belum lagi kasus korupsi segenap kroni dan keluarganya menjadikan dirinya sasaran empuk militer untuk melakukan kudeta, perlu digarisbawahi bahwa Raja Bhumibol Adulyadej merupakan sosok panutan bagi rakyat Thailand yang sangat dihormati dan dijadikan solusi akhir bagi kebuntuan politik di Negara tersebut.

Ada tiga peranan Raja sebagai sumber kekuatan moral dalam sejarah politik dan kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri gajah putih tersebut.

1. Raja adalah pemegang kekuasaan politik, sosial, agama dan budaya tertinggi. Walaupun secara struktur politik kekuasaan raja mulai dibatasi dengan adanya parlemen, militer dan elite politik. Dengan adanya ketidakpercayaan antara elite sipil, militer dan kelas menengah, maka raja dianggap sebagai tempat terakhir untuk menyelesaikan masalah.
2. Raja yang memiliki kekuasaan turun-temurun dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menyelamatkan Negara ketika berada dalam jurang perpecahan nasional. Selama Negara ini berdiri krisis politik akibat pertikaian antara elit sipil dan elit militer, raja selalu menjadi tempat terakhir dalam memecahkan kebuntuan politik.

Walaupun negeri Gajah Putih ini modern ala barat belum mampu

menggantikan peranan raja sebagai pemilik kekuasaan tertinggi. Menurut Duverger bahwa dalam suatu bentuk apapun juga, pengangkatan dan penunjukan penguasa dalam system otokrasi ini sering menyertakan pengakuan bahwa Tuhanlah yang menyertai penguasa tersebut<sup>22</sup>

3. Simbol tertinggi kekuatan moral, raja selalu mampu menempatkan diri (reposisi) yang tepat ketika krisis politik terjadi. Raja jarang terlibat dalam masalah hiruk-pikuk kekuasaan, tapi mencermati ke arah mana panggung politik bergoyang. Dengan demikian posisi raja sebagai sumber legitimasi kekuasaan tradisional sampai sekarang ini tak tergoyahkan di Bangkok ketika ideologi modern yang bernama demokrasi masuk.

Melihat pola budaya masyarakat dan peranan raja dalam politik Thailand ini terkait erat dengan hubungan Patron-Client (Tuan-Hamba) yang merupakan fondasi dari politik Thailand. Seperti yang dituturkan oleh Dr. Colin MacAndrews:

“Jaringan Patron-Client itu juga menjalankan suatu fungsi integrative yang penting. Jaringan dari masyarakat Thai itu terdiri dari kelompok-kelompok yang jumlahnya tak terbatas yang bertindak sebagai penyambung dalam suatu jaringan hubungan timbal-balik yang tersebar luas di segenap masyarakat Thai.”<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Pakpahan, Mukhtar., *Ilmu Negara dan Politik...*, (Op cit), Hal.103.

<sup>23</sup> Mac Andrews, Colin., *Masalah-masalah pembangunan Politik*”, Yoyakarta: Gadjah Mada University prees., 1988., Hal.119

Surya Yudha Regif : Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Thailand Pasca Kudeta Militer Thailand Pada Tahun 2006 Dalam Ruang Lingkup Asean, 2009.



Namun budaya Patron-Client ini dapat menjadikan peran civil society di Thailand menjadi lemah. Bukti dari lemahnya civil society terlihat ketika penggulingan Thaksin sebagai Perdana Menteri Thailand yang terpilih sebagai hasil pemilu yang diselenggarakan pada tahun 1997 dengan partainya yaitu *Thai Rak Thai Party* dan hasil referendum 23 Mei 2006 yang masih memilih dia sebagai Perdana Menteri yang merupakan syarat terbentuknya civil society namun keadaan di Thailand masih labil setelah diadakannya referendum dan hal ini membuat Raja gerah karena Thaksin dianggap tidak mematuhi perintah raja untuk tidak terlibat dalam politik di negeri itu lagi. Oleh sebab itu kelompok oposisi membentuk kekuatan bersama kelompok militer yang didukung oleh raja untuk menggulingkan Thaksin. Bagi mereka (Kelompok Oposisi) untuk menyelamatkan dan untuk menghindari instabilitas politik di Thailand, satu-satunya cara ialah mencabut akar permasalahan tersebut yaitu Thaksin Sinawatra sebagai Perdana Menteri.

Namun dengan melihat Kudeta pada tanggal 19 September 2006 jelas meskipun elite sipil menengah ( perkotaan ) ikut andil dalam menumbangkan pemerintahan Thaksin Sinawatra, namun yang terlihat jelas melakukan adalah elite militer yang terlihat dalam pergolakan politik tersebut. Pergantian kekuasaan diambil alih oleh Panglima Angkatan Darat jenderal Sonthi Boonyaratkalin dan kemudian memberikan kekuasaan sementara kepada jenderal Surayud Chulanond untuk menggantikan Thaksin Sinawatra hingga akhirnya digantikan oleh Samak Sundaravej yang dipilih oleh parlemen selama ia menjabat pergolakan politik masih terjadi karena beberapa politisi menganggap ia masih berkroni dengan Thaksin Sinawatra

namun pada tanggal 9 September 2008 ia dicopot jabatannya dari jabatan Perdana Menteri.

Surya Yudha Regif : Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Thailand Pasca Kudeta Militer Thailand Pada Tahun 2006 Dalam Ruang Lingkup Asean, 2009.



Menteri karena masuk acara hiburan di televisi hal itu bertentangan dengan konstitusi di Thailand. Pergulingan kekuasaan yang dilakukan oleh militer dengan cara kudeta jelas-jelas tidak sah menurut konstitusi karena Thaksin dipilih oleh rakyatnya dengan cara konstitusional secara Demokrasi sedangkan Negara Thailand dalam 15 tahun terakhir mencoba membangun masyarakat demokrasi.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kudeta terjadi di antaranya yang terpenting adalah yang pertama, dukungan Raja yang secara tersirat disampaikan lewat Jendral Prem, penasehat Raja. Raja Bhumipol sendiri sudah sejak lama menunjukkan ketidaksenangannya pada Thaksin. Tanpa dukungan seperti ini, tidak mungkin seorang perwira seperti Jendral Shonti, berani mengambil tindakan kudeta.

Kedua, Thaksin telah mengembalikan konflik politik ke dalam tubuh militer dengan upayanya untuk memajukan orang-orang dekatnya dan menyingkirkan orang-orang yang dianggap kurang kooperatif. Diperkirakan, Thaksin telah bersiap-siap sebelum kudeta untuk melakukan reshuffling yang hebat di tubuh militer. Akibatnya, sebagai institusi, militer mengembangkan kepentingan untuk melindungi otoritas dan otonominya terhadap pemerintah Thaksin.

Ketiga, militer mencium bahwa golongan menengah perkotaan, terutama di Bangkok, yang selama ini menentang peranan politik militer, justru akan mendukungnya. Setidak-tidaknya, golongan menengah ini tidak akan menentanginya karena mereka juga berharap Thaksin cepat meninggalkan kekuasaan. golongan menengah perkotaan (terutama intelektualnya) inilah yang selama ini gemar berbicara tentang demokrasi dan sekarang mengumandangkan pikiran aneh bahwa kudeta militer justru untuk 'menyelamatkan' demokrasi.

Dalam hubungannya dengan kudeta itu, terjadi kesalahan – kesalahan yang mendasari Thaksin dalam hubungannya dengan militer sehingga ia harus dikudeta yakni : Thaksin telah mengembalikan konflik politik ke dalam tubuh militer dengan upayanya untuk memajukan orang-orang dekatnya dan menyingkirkan orang-orang yang dianggap kurang kooperatif. Lebih jauh lagi kebijaksanaan Thaksin di Selatan, telah membuat marah banyak perwira militer. Selain meningkatkan peranan kepolisian (yang memang dekat dengan Thaksin karena ia bekas polisi dan juga kawin dengan anak bekas perwira tinggi kepolisian) di Selatan dan mengecilkan peranan tentara, Thaksin telah bersitegang dengan Jendral Shonti secara langsung. Yang agak ironis, Thaksin yang sipil justru mendukung kebijaksanaan garis keras terhadap pembangkang di Selatan, sedangkan Jendral Shonti (yang Muslim), lebih cenderung pada perundingan.

Pada awal tahun 2006, terjadi aksi massa besar-besaran yang menuntut Thaksin mundur dari jabatannya. Tapi, aksi massa tersebut hanya sukses sebentar, selanjutnya Thaksin kembali menjadi PM. penyebab kegagalan gerakan massa saat itu dikarenakan Partai-partai yang bergabung dalam PAD, seperti Demokrat, Chart Thai, dan Mahachon kurang mempunyai dukungan akar-rumput yang kuat. Mereka mengetahui dalam pemilu terbuka akan kalah pada Thai Rak Thai yang sampai sekarang masih populer di kalangan pedesaan. Aksi boikot pemilu memang melukai Thaksin, karena hasil pemilu April akhirnya dibatalkan sebab dinyatakan tidak sah. Tetapi, mereka tidak mampu melangkah lebih jauh. Akibatnya, yang terjadi adalah 'stalemate' yang berkepanjangan hingga terjadi kudeta militer. Lebih jauh lagi,

banyak aktor yang terlibat dalam aksi tersebut kurang mempunyai legitimasi karena

Surya Yudha Regif : Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Thailand Pasca Kudeta Militer Thailand Pada Tahun 2006 Dalam Ruang Lingkup Asean, 2009.

latar belakang mereka sebagai bekas orang dekat Thaksin.

Konstelasi politik, perspektif ideologis, dan basis dukungan dari kelompok penentang Thaksin yang gagal sebenarnya dapat dilihat dari Partai politik di Thailand, pada umumnya tidak punya perspektif ideologis yang kuat. Parpol Thailand lebih merupakan aliansi-aliansi sesaat dan taktis di antara orang-orang kuat, berpengaruh atau kaya. Meskipun demikian, Partai Demokrat kelihatannya didukung teknokrat lokal sebab, di bawah Chuan Lekpai, partai ini pernah menjadi pendorong utama proses liberalisasi ekonomi pasca-Krisis Asia . Di masa lalu, partai ini dianggap sebagai partai pro-monarki. Di tahun 1940-an, di bawah Seni Pramroj, partai ini sempat bertentangan dengan gerakan Pridi (salah satu tokoh utama kudeta 1932 terhadap kerajaan absolutis) yang lebih progresif dan bernuansa sosialis. Partai Chart Thai, yang sekarang kelihatannya mulai banyak menampung orang dekat TRT yang mau menyeberang – adalah partai yang cenderung konservatif.

Salah satu tokoh Sondi Limthongkul, adalah motor gerakan kelas menengah-atas perkotaan, pasca kudeta militer yang menyatakan langsung dukungannya terhadap kudeta. Sondi adalah bekas tokoh mahasiswa kiri di tahun 1970-an, yang kemudian menjadi konglomerat bisnis media massa sejak tahun 1980-an. Di tahun 1990-an dia mulai beraliansi dengan Thaksin. Dia sempat menjadi pembawa acara tv yang banyak dia pakai untuk mengkritik Thaksin setelah mereka pecah. Sumber perpecahan mereka kabarnya adalah dibatalkannya kebijaksanaan pemerintah Thaksin, untuk membatalkan sebagian besar hutang Sondi. Orang lain yang penting adalah Chamlong, bekas jendral, walikota Bangkok, dan tokoh pemberontakan 1992 melawan pemerintah militer di bawah Suchinda. Pada tahun 1976 dia menjadi

pimpinan perwira yang dikenal sebagai 'Young Turks' kelompok yang dianggap paling bertanggungjawab atas pembantaian terhadap gerakan mahasiswa periode 1970-an. Dia juga pernah amat dekat dengan Prem. Chamlong bekas ketua partai Palang Dharma, yang sempat menjadi kendaraan Thaksin pula di masa lebih awal karir politiknya, juga adalah penganut agama Buddha garis keras yang tampaknya kecewa dengan watak kapitalisnya Thaksin.

Fenomena yang terjadi khusus di kalangan akar rumput, basis dukungan Thaksin sebagian besar adalah petani. Thaksin adalah representasi kemenangan borjuasi Thailand pasca-Krisis Asia . Mereka mengambil alih kekuasaan Negara untuk melindungi kepentingan mereka yang waktu itu terancam oleh kebijaksanaan Chuan Lekpai, yang cenderung menguntungkan modal asing. Tapi semakin lama, Thaksin lebih mementingkan kepentingan kelompok bisnisnya sendiri dan membuat marah elemen-elemen borjuasi lainnya. Masalahnya, Thaksin semakin menjadi representasi kemenangan satu orang anggota borjuasi, bukan kelas borjuasi secara umum atau kolektif.

Walaupun demikian, Thaksin secara cerdas menggabungkan kebijaksanaan neo-liberal (misalnya ketika kebijaksanaan privatisasi menguntungkannya) dan kebijaksanaan populis yang memenangkan dukungan kaum petani. Di kalangan petani, dia dikenal sebagai satu-satunya PM yang memenuhi janji kampanyenya. Dia menyuntik dana besar kepada setiap desa, mengembangkan kebijaksanaan 'one tambon one product' dan membuat biaya pengobatan murah bagi orang miskin (suatu hal yang membuat Thaksin tidak populer di kalangan dokter medis).

Pada dasarnya, Thaksin mampu melakukan semua ini karena upayanya yang



berhasil untuk melakukan sentralisasi kekuasaan Negara pada dirinya sendiri – termasuk kekuasaan anggaran. Belum lagi kekayaan pribadinya serta berbagai sumber dana off-budget yang kabarnya dikuasai oleh Thaksin. Dengan basis dana seperti ini money politics yang digencarkan Thaksin amat sulit dilawan partai lain. Partai Demokrat, misalnya cuma kuat di kota besar seperti Bangkok dan di Selatan, yang amat membenci Thaksin.

Berkaitan dengan basis dukungan akar rumput, Kelompok progresif Thailand tidak punya kendaraan politik yang baik, Upaya tokoh kiri, Giles Ungpakorn, untuk membentuk partai bernuansa sosialis, yang pernah gagal. Intelektual progresif masa 1970-an dan 1980-an menjadi pembantu Thaksin sebagai asumsi militer, militer berhasil ‘mengambil alih’ Negara dengan cara itu. Sebagian lagi menjadi pengusaha atau tenaga ahli yang mendukung partai-partai yang tidak berwawasan maju. Kekuatan LSM juga beragam ciri politiknya – sebagian adalah ‘tukang’ pembangunan. Assembly of the Poor, yang sempat giat di kalangan miskin desa (dan kota untuk sebagian), kelihatannya sudah lewat masanya. Serikat buruh sudah lama tercerai berai, walaupun ada sektor-sektor yang kadang-kadang menunjukkan militansi.

## **B. Karakteristik Budaya Politik Thailand**

Hubungan budaya politik Thailand dengan peristiwa kudeta sangatlah erat, masalah kudeta militer dan rezim junta militer juga sangatlah kental dalam perpolitikan di Thailand. Tak heran jika proses demokratisasi disana mengalami

hambatan dan tantangan menuju sistem demokrasi yang sesungguhnya. Tentunya  
Surya Yudha Regif : Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Thailand Pasca Kudeta Militer Thailand Pada Tahun 2006 Dalam Ruang Lingkup Asean, 2009.



dinamika ini tak lepas juga dari budaya politik masyarakat Thai yang masih bersandar dan berpegang pada nilai-nilai tradisional, sementara dalam demokrasi membutuhkan nilai-nilai kontemporer yang mengacu pada budaya Barat. Hal inilah yang kemudian berimplikasi pada pembentukan state-building dan konstitusi yang mengatur distribusi kekuasaan politik Thailand dimana selalu diwarnai oleh perebutan dan persaingan antara elit militer, sipil, dan cendekiawan.

Nilai paternalisme dan patriarkal dalam budaya Thai masih melekat erat, dimana mereka menganggap raja sebagai “father” dalam mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih baik. Selain itu, raja dianggap sebagai perwakilan Wisnu, Siwa, dan Budhisattava yang merupakan titisan dewa. Sehingga tak heran bila masyarakat Thai lebih mencintai raja daripada politik. Segala tindak raja merupakan perwujudan dewa yang harus dipatuhi. Hal ini kemudian bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang dilandaskan pada nilai-nilai liberal. Nilai-nilai tersebut tidak hanya bertentangan tapi nilai tradisional tersebut tetap dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Thai. Akibatnya, budaya politik dan derajat partisipasi masyarakat Thailand sangat pasif. Padahal untuk membangun sistem demokrasi diperlukan budaya dan derajat partisipasi politik yang signifikan, yaitu sebuah budaya politik partisipan dan subjek (G.Almond). Implikasinya adalah, dengan kepasifan politik masyarakat Thailand, maka perebutan kekuasaan antara militer, sipil, dan cendekiawan selalu terjadi dan ini menjadi salah satu problem lain dalam demokrasi di Thailand. Elit militer merasa dirinya memiliki kapabilitas dan kapasitas dalam menjalankan pemerintahan dan negara karena latarbelakang pendidikan akademi

militer dapat membuat mereka berpikir strategis dan taktis yang memang diperlukan

Surya Yudha Regif : Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Thailand Pasca Kudeta Militer Thailand Pada Tahun 2006 Dalam Ruang Lingkup Asean, 2009.

oleh pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, secara historis mereka menganggap dirinya berjasa atas pertahanan dan keamanan Thailand dari kekuatan eksternal baik pada zaman monarki maupun saat revolusi. Di pihak lain, sipil menganggap bahwa masalah politik merupakan wilayah sipil yang harus lepas dari campur tangan militer. Mereka cenderung mendukung profesionalisme militer daripada fungsi militer di ranah politik. Anggapan mereka bahwa campur tangan militer dapat menghambat proses politik dan demokrasi. Menurut Sundhaussen (1999) bahwa kebiasaan militer cenderung anti-demokrasi. Lanjutnya bahwa persepsi tentang lawan dan bagaimana berurusan dengan mereka sering kali menggiring rezim militer memperlakukan lawan politik lebih keras dari sepatutnya sehingga merintangi penyelesaian politik. Sementara, pihak cendekiawan menganggap bahwa dalam menjalankan pemerintahan dan negara diperlukan sebuah kerangka berpikir dan ilmu mengenai pemerintahan dan politik dimana hanya kaum cendekiawan itulah yang bisa melakukan. Dengan pondasi pengetahuan dan ilmu yang mereka miliki tersebut mereka menganggap bisa menjalankan dan selalu menemukan penyelesaian masalah dalam menghadapi krisis.

Perselisihan dan persaingan politik tersebut pada hakikatnya tak membawa masyarakat Thailand pada kondisi seperti di Filipina ataupun Myanmar. Karena peran Raja tetap eksis sebagai simbol zaman keemasan Thailand dan sebagai pengayom masyarakat Thai. Setidaknya pandangan tersebut menjadikan masyarakat Thai sebagai masyarakat yang “tentram” tanpa ada pertumpahan darah sebagai akibat persaingan kaum elit tersebut.

Secara garis besar, ada beberapa karakteristik budaya politik Thailand, yaitu:

Surya Yudha Regif : Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Thailand Pasca Kudeta Militer Thailand Pada Tahun 2006 Dalam Ruang Lingkup Asean, 2009.

1. Otoritarianisme yakni budaya politik yang ada di Thailand cenderung mengarah pada otoritarianisme dimana kepemimpinan dipandang sebagai representasi dari dewa sehingga pelaksanaan perintah nyaris tanpa celah untuk dikritisi. Terlebih ini didukung dengan budaya patriakal dan paternalistik yang cenderung mengagungkan pemimpin sebagai “father” dalam keluarga yang punya wewenang dan kekuasaan atas keluarganya.
2. Patron Klien yakni kaum elit lebih mengedepankan kepentingan kelompoknya sendiri dari pada kepentingan untuk melayani rakyat. Sehingga karakter elit lebih pada “tuan yang diagungkan” dari pada “servant of people”. Hal ini berdampak pada hubungan antar elit atas kelompoknya lebih kuat daripada dengan rakyat.
3. Personalisme yakni hubungan personal lebih penting dalam politik Thailand. Begitu pula fungsi seorang tokoh akan sangat menentukan garis kebijakan politik karena orang Thailand yang pragmatis lebih melihat figur tokoh daripada ideologi ataupun latarbelakang partai.
4. Hirarkis yakni orang Thailand lebih mementingkan tingkatan status daripada pencapaian seseorang. Senioritas, strata sosial, kekayaan, menjadi faktor utama daripada prestasi seseorang. Hal ini kemudian yang mengarahkan masyarakat Thailand pada masyarakat yang unik.
5. Tradisionalisme yakni masyarakat Thailand masih memegang kuat kepercayaan mistis dan tahayul serta kepercayaan pada nenek moyang. Hal ini membuat irasionalitas menjadi hal yang umum terjadi dalam menghadapi kehidupan (sifat konservatif).

6. Pasivitas yakni sifat tradisional dan percaya pada adanya hirarki serta takdir membuat masyarakat Thailand menjadi pasif dan tidak memiliki interest terhadap proses dan partisipasi politik.
7. Cinta Damai yakni hal ini tak lepas dari pengaruh agama Budha yang dianut orang Thailand yang mengajarkan ajaran-ajaran cinta dan damai. Sehingga mereka lebih memilih untuk mengalah dalam rangka mencapai kedamaian bersama daripada konfrontasi yang berdampak pada ketidakdamaiian. Sehingga tak heran jika terjadi kudeta militer tidak sampai terjadi peristiwa berdarah. Karena selain peran Raja yang berpengaruh terhadap legitimasi kudeta tersebut, peran agama Budha yang cinta damai juga tak kalah pengaruhnya terhadap way of life masyarakat Thai.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat dilihat bahwa demokrasi yang ada di Thailand akan selalu mengalami dan menghadapi two face of dilema dan binary opposition, yaitu di satu sisi nilai demokrasi berusaha diterapkan dan dijalankan dengan sepenuh hati namun disisi lain ada nilai-nilai tradisional yang berbenturan dengan paham demokrasi. Terlebih hal itu diperparah dengan persaingan politik antara kaum elit yang ada. Jadi, proses transisi menuju Demokrasi yang sesungguhnya sesuai dengan nilai-nilai liberalisme sangat panjang dan berliku yang musti dihadapi oleh Thailand.

Tentunya untuk menerapkan sebuah rezim demokrasi di Thailand butuh waktu yang panjang dan proses adaptasi yang memakan biaya-sosial yang tinggi manakala nilai-nilai liberalisme Barat harus menjadi nilai utama dalam tranformasi sosial menuju demokrasi sesungguhnya. Hal ini diperlukan karena, demokrasi tidak



akan bisa diterapkan tanpa menerapkan nilai-nilai Barat yang memang merupakan pondasi utama bagi kemajuan demokrasi suatu negara.

Masyarakat Thailand terjebak pada penerimaan sebuah nilai yang bukan merupakan nilai yang berasal dari budaya setempat. Dan ini membawa pada dua opsi yaitu menerima atau tidak. Jika pada posisi menerima maka mereka telah merubah tatanan nilai dan norma sesuai dengan nilai Barat. Jika mereka pada posisi tidak menerima maka anggapan bahwa nilai tradisional mereka merupakan nilai yang tidak dapat dihilangkan dan ditinggalkan begitu saja karena telah mengakar kuat dalam akar budaya dan sistem kepercayaan mereka serta merupakan system yang terbaik bagi Thailand. Bagi masyarakat Thai, hal tersebut cenderung pada opsi tidak menerima, karena nilai-nilai yang mereka miliki merupakan nilai warisan nenek moyang dan merupakan hal yang sakral apabila ditinggalkan. Terlebih, akar budaya agama Budha sangatlah kental dalam membentuk karakter masyarakat Thai. Tak heran jika budaya politik mereka adalah Parokial, dicirikan dengan rendahnya pengetahuan dan kesadaran politik, dan Subjek, dicirikan kepatuhan pada pejabat-pejabat pemerintahan dan hukum yang berlaku.

### **C. Politik Thailand Pasca Kudeta Militer**

Thailand memang merupakan negara yang paling banyak diwarnai dengan unjuk rasa dan juga kudeta, yang semuanya selalu berujung pada pergantian pihak berkuasa yang ada di sana. Kudeta itu terus terjadi bahkan sejak tahun 1932 sampai sekarang. Kudeta yang terus terjadi itu merupakan suatu tanda bahwa pemerintahan

yang selama berlangsung di Thailand tidak pernah tepat. Pemerintahan yang korup

Surya Yudha Regif : Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Thailand Pasca Kudeta Militer Thailand Pada Tahun 2006 Dalam Ruang Lingkup Asean, 2009.



ataupun peraturan perundang-undangan yang tidak beres mengakibatkan buruknya pemerintahan Thailand. Semua kudeta yang terjadi tersebut selalu memunculkan dugaan kalau militer selalu melatarbelakanginya. Dari 70 persen analisa yang ada memang ditemukan dugaan bahwa militer bermain dibelakang semuanya. Keterlibatan militer Thailand di semua kudeta itu memang tidak dapat dipungkiri lagi.

Selama ini petinggi militer Thailand selalu memainkan peran sangat penting ditiap peristiwa kudeta dan unjuk rasa yang terjadi. Sejak awal terjadinya kudeta di Thailand sudah beberapa kali militer juga melakukan kudeta, baik itu oleh semua angkatan yang ada atau hanya sebagian saja. Tetapi itu sudah cukup efektif untuk menggulingkan pemerintahan sementara di Thailand. Panglima Militer selaku pimpinan tertinggi militer Thailand benar-benar memiliki kekuasaan mutlak atas militer, sehingga menyebabkan kemungkinan terjadinya kudeta sangat terbuka. Militer melatarbelakangi hampir semua kudeta yang terjadi di Thailand juga dipastikan ada sebabnya. Selama ini sipil dinilai belum bisa untuk memimpin Thailand, selalu timbul pemerintahan yang korup apabila dipimpin oleh pemerintah sipil.

Sementara itu apabila militer diberi kekuasaan penuh di Thailand maka akan tercipta pemerintahan rezim, yang mengakibatkan sistem demokrasi tidak bisa berjalan apabila berdekatan dengan sistem militer.

Rezim militer apabila berkuasa selalu mendapat tekanan asing untuk segera menyerahkan kekuasaannya kepada sipil, ini dikarenakan untuk menghindari hilangnya sistem demokrasi yang ada dan juga pelanggaran terhadap human rights.

Hal-hal tersebut diatas yang menyebabkan tekanan dunia internasional agar supaya militer menyerahkan kekuasaannya kepada sipil dan tidak berkuasa terlalu lama di Thailand. Pemerintahan sipil yang pernah terjadi di Thailand, sampai dengan pemerintahan Thaksin Sinawatra, tidak bisa dijadikan sebagai acuan pemerintahan yang kredibilitas bagi Thailand. Pemerintahan sipil yang pernah ada selama ini selalu mengarah kepada pola pemerintahan sipil yang korup dan juga dipandang lebih sewenang-wenang daripada pemerintahan militer. Pemerintahan PM Samak Sundaravej sebagai pemerintahan sipil sekarang di Thailand telah mengalami mosi tidak percaya dari rakyat karena hendak mengamandemen konstitusi yang sudah ada.

Telah banyak bukti bahwa pemerintahan sipil di Thailand tidak pernah berhasil dalam memimpin rakyat Thailand. Hal ini menyebabkan militer berpikir untuk kembali memegang tampuk pemerintahan di Thailand, militer menganggap sipil belum layak dan pantas untuk memimpin. Ketidakseimbangan antara sipil-militer ini seringkali terjadi di Thailand, menyebabkan terjadinya kesenjangan pemikiran dan ideologis antara sipil-militer. Dunia internasional kini membutuhkan era kepemimpinan baru di Thailand, dunia internasional membutuhkan jawaban baru siapa yang harus memimpin Thailand. Pemerintahan sipil sudah terbukti belum sanggup untuk memimpin Thailand tanpa adanya korupsi dan juga penyimpangan-penyimpangan lain yang biasa terjadi pada pemerintahan sipil. Pemerintahan militer dianggap masih cocok untuk memimpin Thailand, tetapi pemerintahan militer yang terlalu lama juga dianggap terlalu cocok untuk memimpin Thailand. Pemerintahan militer yang terlalu lama bisa menimbulkan suatu pemerintahan rezim dan dapat mengganggu proses demokratisasi yang ada.

Peranan golongan militer seperti ini merupakan ciri dari negara tradisional, sebab kaum militer dari kelompok elit mempunyai tiga fungsi yaitu :

1. membantu memelihara mantapnya ketertiban.
2. memberikan saluran penting untuk meningkatkan stabilitas, dan
3. seringkali merupakan perintis modernisasi yang bersifat revolusioner.<sup>24</sup>

Namun pada kenyataannya bukanlah suatu hal yang bertentangan bahwa pasukan militer memelihara ketertiban dan pada waktu yang sama menyebabkan banyaknya kekerasan.

Sebagai salah satu anggota Asean, Thailand merupakan suatu negara yang dipandang cukup mampu baik itu dari segi ekonomi maupun politik. Untuk itu diharapkan konflik yang terjadi di Thailand segera dapat diselesaikan dengan segera. Karena, apabila konflik tersebut terjadi terlalu lama dapat menimbulkan akibat yang buruk bagi negara-negara kawasan. Dan juga dikhawatirkan munculnya campur tangan dari pihak-pihak lain yang mengharapakan hubungan antar negara Asean tidak berjalan dengan baik. Melihat segala macam hal-hal yang dapat terjadi dari konflik internal yang terjadi di diharapkan segera ditemukan solusi untuk hal tersebut. Diharapkan segera terbentuk segera pemerintahan yang stabil dan baik yang segera dapat berjalan di Thailand. Sehingga kerjasama-kerjasama bilateral dan regional yang selama ini sudah ada dapat terjaga dengan baik. Ketidakstabilan politik dalam negeri di Thailand berarti juga ketidakstabilan bagi kawasan, karena bisa mengancam masalah pertahanan dan keamanan bagi kawasan. Sementara kestabilan politik di

---

<sup>24</sup> Organski., *Tahap – tahap perkembangan politik.*, Jakarta; Akademika Presindo., 1985 hal.52.

Surya Yudha Regif : Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Thailand Pasca Kudeta Militer Thailand Pada Tahun 2006 Dalam Ruang Lingkup Asean, 2009.

Thailand berarti kestabilan juga bagi kawasan, baik itu kawasan regional maupun internasional.

Hari – hari di Thailand saat ini sangat perlu dicermati, untuk melihat mengapa demokrasi politik di negara Thailand begitu berliku dan diwarnai oleh aksi saling membalas. Sebagaimana berbagai media menginformasikan perkembangan terakhir menunjukkan telah terpilihnya perdana menteri dari partai oposisi yakni Abhisit Vejjajiva. Ketua Partai Demokrat Thailand sejak 2005 menang dalam pemungutan suara khusus di parlemen , mengalahkan saingannya mantan kepala kepolisian, Pracha Promnok, 235 banding 198 suara.

Sebagai perdana menteri Abhisit Vejjajiva pemerintahannya akan fokus pada harmoni nasional dan isu ekonom. Perekonomian Thailand melambat karena krisis politik dalam negeri dan krisis finansial global adapun isu harmoni nasional jelas tak kalah menyulitkannya. Kubu oposisi merasa terpilihnya Abhisit tak lepas dari intervensi militer. Dari luar negeri, Thaksin sempat gencar mengingatkan agar militer tidak ikut campur tangan dalam proses pemilihan perdana menteri di parlemen. Tentu saja pihak militer membantah telah ikut campur tangan dalam politik.

Abhisit, yang kini berusia 44 Tahun, tentu saja segera menjadi politisi paling fenomenal saat ini. Dia realtif masih muda, lebih dari itu dia akan dihadapkan oleh sejumlah potensi konflik politik yang bersifat saling membalas. Di tangannya berbagai masalah politik tidak juga kunjung henti. Dapat di ambil contoh ketika pada saat KTT ASEAN yang akan diselenggarakan di Patayya, Thailand yang akhirnya dibatalkan karena negara Thailand dalam keadaan darurat sebab terjadi gelombang

demonstrasi besar demonstran berseragam merah menuntut Perdana Menteri Thailand

Surya Yudha Regif : Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Thailand Pasca Kudeta Militer Thailand Pada Tahun 2006 Dalam Ruang Lingkup Asean, 2009.



Abhisit Vejjajiva supaya mundur. Situasi itu menjadi pukulan telak bagi Abhisit yang berupaya menampilkan kesan situasi kondusif sejak berkuasa dalam pemilihan di parlemen lalu menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi yang membubarkan pemerintahan PM Wongchai Wongsawat karena kecurangan pemilu. Namun, selama masa kekuasaan Abhisit, demonstrasi antipemerintah terus dilakukan massa yang pro mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra. Situasi politik di Thailand memang menjadi tak menentu semenjak kekuasaan militer mengambil alih pada 2006.

Jika situasi politik di Thailand terus berlangsung seperti itu, tak menutup kemungkinan kudeta militer kembali akan menguasai Thailand. Tergulingnya kekuasaan Thaksin Shinawatra lewat kudeta militer di satu sisi mengancam demokrasi Thailand. Di sisi lain, kekuasaan Thaksin ketika itu memang tak bisa ditoleransi karena sudah berkuasa melampaui ciri-ciri negara demokratis.

Meskipun Thailand kini dikuasai pemerintahan sipil, dominasi politik militer di Thailand masih sangat kuat dan tak menutup kemungkinan akan berkuasa lagi, sama halnya dengan situasi politik Myanmar. Jika kekuasaan militer kembali berkuasa, demokrasi di Asia Tenggara mengalami apa yang diistilahkan Samuel Huntington dalam *The Third Wave Democratization* (1998) sebagai penurunan gelombang demokrasi. Jika demokrasi ibarat jarum jam, demokrasi Asia Tenggara kini di posisi bawah mengalami penurunan yang sangat drastis.

Ciri-ciri negara demokratis, menurut Huntington, salah satunya ialah kekuatan militer harus kembali ke barak. Tugas militer ialah mengamankan negara dari kemungkinan 'serangan musuh', baik dari dalam maupun luar. Tugas kekuasaan diberikan kepada masyarakat sipil yang representatif dan memenuhi syarat sebagai



pemimpin. Power sharing dipetakan berdasarkan kapabilitas; keamanan diberikan kepada militer; dan tugas kenegaraan diemban oleh sipil. Ciri negara demokratis lainnya ialah kebebasan untuk menyuarakan pendapat, pers dijamin dan diberi kebebasan oleh undang-undang, terjadinya pemilu secara jujur dan adil, serta adanya otonomi masing-masing kelembagaan yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Masing-masing lembaga itu bekerja sesuai kinerja yang diatur oleh undang-undang. Satu dengan lainnya independen tanpa ada campur tangan yang akan melunturkan otonomi kelembagaannya. Kekuatan militer di Thailand memang sangat ironi. Jika kudeta kembali terjadi, itu akan menambah deretan negara-negara otoriter di Asia Tenggara. Kubu pendukung mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra yang kini menjadi buronan negara Thailand memang cenderung telah dapat “ditaklukkan” di level elite, bahkan banyak yang telah membangkang dan berdiri di pihak Abhisit. Tetapi di level massa, pendukung Thaksin tampak segera memperoleh momentum untuk berkonsolidasi mempersiapkan tekanan – tekanan baru atas kebijakan pemerintah dalam membenahi kembali perekonomian nasional dan banyak hal. Suhu politik di level massa ternyata belum sepenuhnya mendingin. Gelombang unjuk rasa besar – besaran dan bertele – tele dalam tahun – tahun terakhir di Thailand bagaimanapun dapat menyebabkan para petinggi pemerintahan memiliki alasan untuk trauma. Sebelumnya Perdana Menteri Somchai Wongsawat terus – menerus didesak mundur oleh pengunjuk rasa anti Thaksin. Somchai wongsawat dinilai sebagai orang dekat dan kepanjangan tangan Thaksin. Para pengunjuk rasa bermotif politik itu bahkan berhasil memblokade Bandara udara Don Muang dan Suvarna bhumi. Akibatnya,

seluruh penerbangan dari Bangkok dan ke Bangkok menjadi lumpuh. Bangkok segera

Surya Yudha Regif : Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Thailand Pasca Kudeta Militer Thailand Pada Tahun 2006 Dalam Ruang Lingkup Asean, 2009.

menjadi sorotan dunia. Tapi perkembangan selanjutnya demikian menentuka lagi sejarah masa depan Thailand sendiri, Mahkamah Konstitusi Thailand memubarkan partai penguasa PPP sekaligus memaksa Shomcai mundur sebagai konsekuensi atas larangan berpolitik atas dirinya. Memperkuat koalisi politik juga merupakan tugas tak ringan bagi Abhisit, setidaknya dalam bulan – bulan mendatang. Tingkat dukungan di level elite bisa menguat dan melemah. Sesungguhnya Partai Demokrat tak sekuat kekuatan politik pihak oposisi sekarang kalau solid. Sisa sisa kekuatan politik Thaksin, tidak dapat diabaikan, walau sudah dua perdana menteri dari partainya dilengserkan yakni shomchai dan Samak Sundaravej. Pragmatisme politik di tingkat Elite bisa membuat “koalisi pendukung” Abhisit merapuh, khususnya apabila pengaruh Thaksin mampu menarik kembali orang-orangnya. Itu bisa saja terajadi apabila tekanan – tekanan politik dari level massa pro-Thaksin menguat dan apabila pemerintah di nilai lamban dan gagal, sementara raja lebih terlihat “diam”.

Jadi, faktor Thaksin tidak dapat diabaikan, selain faktor sikap Raja dan Militer. Thaksin memang telah kehilangan kekuasaan setelah kudeta militer pada 2006 yang lalu, baik negara, tanah air, bahkan keluarga pun telah hilang. Walau terbuang ia masih memiliki magnet politik yang belum sepeuhnya memudar. Thaksin masih dielu – elukan, khususnya dikawasan pedesaan Thailand. Thaksin sendiri masih berharap bisa kembali ke dunia politik Thailand secara formal. Tentu saja hal demikian sangat bergantung pada sikap dan restu raja Bhumibol Adulyadej serta melunaknya kalangan militer.

Dukungan Abhisit kali ini memang lebih banyak diperoleh dari partai – partai kecil dan faksi pro-Thaksin membelot. Pola konflik politik Thailand yang memang

Surya Yudha Regif : Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Thailand Pasca Kudeta Militer Thailand Pada Tahun 2006 Dalam Ruang Lingkup Asean, 2009.

sangat menyulitkan posisi Abhisit. Dia memang telah berhasil merangkul sebagian elite pro-thaksin untuk memihak ke pemerintahannya tapi itu hanya bersifat jangka pendek. Dia tentu tentu akan menjalin kerjasama yang erat dengan militer, dan tentu saja Raja. Namun, militer Thailand pasca kudeta terkesan enggan untuk terlalu dikesankan masuk terlalu jauh dalam urusan politik. Upaya membiarkan militer setidaknya tidak ikut campurnya militer secara langsung dalam menghentikan gelombang unjuk rasa massa anti-Thaksin, mengesankan militer tidak mau dijuluki segala biang kerok carut – marut keadaan yang terjadi di politik Thailand.

Dalam dinamika politik Thailand saat ini, kesan Raja cenderung terlihat diam atau seperti halnya secara frontal mengeluarkan perintah secara terang – terangan dalam mencegah konflik terbuka secara terus – menerus. Restu Raja Bhumibol Adulyadej hadir setelah terpilihnya Abhisit. Raja merupakan simbol legitimasi formal, dan tampaknya menjaga jarak dari hari ke hari politik Thailand. Konflik akan segera mengemuka kembali pasca terpilihnya Abhisit dan tampaknya raja akan tetap tidak terpancing untuk intervensi secara langsung atas kemelut politik yang membayang di depan mata.

Raja seperti seorang ayah yang membiarkan anak – anaknya berkelahi hingga pada akhirnya mereka bisa bersikap dewasa dengan mengambil hikmah dari dampak buruk perkelahian politik yang berlarut – larut. Dilhat dari perkembangan politik di Thailand Raja mendewasakan demokrasi meski dengan jalan berdarah – darah dan melelahkan. Menghargai proses yang terjadi di Thailand baik perseteruan antara elite dengan elite, elite dengan rakyat dan rakyat dengan rakyat nampaknya menjadi jalan yang harus dijalani ketimbang sebuah proses yang menghasilkan sebuah hasil akhir.

Raja senantiasa menjadi simbol kultural yang tetap terjaga dan masih kuat berpengaruh walaupun tidak nampak peran yang begitu nyata di hadapan media maupun publik internasional.

### **BAB III**

## **DIPLOMASI DAN ARAH KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DI ASEAN DAN PASCA KUDETA MILITER THAILAND PADA TAHUN 2006**

### **A. Diplomasi dan Politik Luar Negeri Indonesia**

Pada hakekatnya kepentingan nasional Indonesia adalah menjamin kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia yang berada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, tegaknya NKRI yang memiliki wilayah yurisdiksi nasional dari Sabang sampai Merauke sangat perlu untuk dipelihara. Namun mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas, dimana terdiri lebih dari 17.500 pulau, memiliki posisi yang sangat strategis di antara benua Asia dan Australia, serta di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Dengan posisi strategis tersebut, maka berbagai negara khususnya negara-negara besar memiliki kepentingan terhadap kondisi stabilitas keamanan di Indonesia. Implikasi dari kepentingan negara lain tersebut menimbulkan kecenderungan campur tangan

atau kepedulian yang tinggi dari negara-negara tersebut terhadap kemungkinan

Surya Yudha Regif : Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Thailand Pasca Kudeta Militer Thailand Pada Tahun 2006 Dalam Ruang Lingkup Asean, 2009.



gangguan stabilitas keamanan Indonesia.

Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, maka kepentingan nasional Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kepentingan nasional tersebut diaktualisasikan salah satunya dengan pelaksanaan politik luar negeri bebas dan aktif. Polugri ini dituangkan kedalam program kerja kabinet, dan pada saat ini, kebijakan luar negeri Indonesia pada tahun 2009 merupakan bagian dari kebijakan pemerintahan Kabinet Indonesia bersatu (2004-2009), yang konsisten diabdikan bagi kepentingan nasional.

Pencapaian kepentingan nasional Indonesia di dunia internasional tidak terlepas dari perubahan lingkungan strategis baik dalam tataran global maupun regional yang memberikan tantangan sekaligus kesempatan bagi proses pencapaian kepentingan tersebut. Dan dalam rangka menghadapi tatanan dunia yang semakin berubah dengan cepatnya, semakin disadari perlunya untuk mengembangkan kelenturan dan keluwesan dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri agar dapat memanfaatkan berbagai tantangan dan peluang yang muncul dari perubahan lingkungan strategis secara optimal. Sehubungan dengan hal tersebut, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kuncinya pada bulan Mei 2005 telah memperkenalkan suatu konsep baru yaitu kebijakan luar negeri “konstruktivis”, yang pada intinya dimaksudkan untuk mengembangkan tiga macam kondisi dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia yaitu:

(1). Pola pikir positif dalam mengelola kerumitan permasalahan luar negeri;

Surya Yudha Regif : Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Thailand Pasca Kudeta Militer Thailand Pada Tahun 2006 Dalam Ruang Lingkup Asean, 2009.



- (2). Konektivitas yang sehat dalam urusan-urusan internasional; dan
- (3). Identitas internasional yang solid bagi Indonesia yang didasarkan pada pencapaian-pencapaian domestik dan diplomatiknya. Diplomasi Indonesia yang dilaksanakan oleh Departemen Luar Negeri (Deplu) turut mengaktualisasikan program dan prioritas Kabinet Indonesia Bersatu yang pada intinya adalah melakukan diplomasi total untuk ikut mewujudkan Indonesia yang bersatu, lebih aman damai, adil, demokratis dan sejahtera.

Perlu disadari dan telah dijelaskan dalam pasal 3 dan pasal 4 Undang- Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri ini merupakan dasar pelaksanaan diplomasi dan Politik Luar Negeri Indonesia, dapat dijelaskan antara lain :

#### *Pasal 3*

Yang dimaksud dengan “bebas aktif” adalah politik luar negeri yang pada hakikatnya bukan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri secara apriori pada satu kekuatan dunia secara aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa dan permasalahan dunia lainnya, demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Yang dimaksud dengan diabdikan untuk “kepentingan nasional” adalah politik luar negeri yang dilakukan guna mendukung terwujudnya tujuan nasional sebagaimana tersebut di dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945.

#### *Pasal 4*

Diplomasi sebagaimana dimaksud dalam pasal ini menggambarkan jati diri dan diplomasi Indonesia.

Diplomasi yang tidak sekedar bersifat rutin, dapat menempuh cara – cara “ non konvensional ” , cara – cara yang tidak terlalu terikat pada kelaziman protokoler ataupun tugas rutin belaka, tanpa mengabaikan norma – norma dasar dalam tata krama diplomasi Internasional.

Diplomasi yang dibekali keteguhan dalam prinsip dan pendirian, ketegasan dalam sikap, kegigihan dalam upaya namun luwes dan rasional dalam pendekatan, yang bersumber pada kepercayaan diri sendiri.

Diplomasi yang mencari keharmonisan, keadilan dan keserasian dalam hubungan antarnegara, menjauhi sikap konfrontasi ataupun politik kekerasan/kekuasaan ( *power politics* ), menyumbang penyelesaian berbagai konflik dan permasalahan di dunia, dengan memperbanyak kawan dan mengurangi lawan.

Diplomasi yang ditopang oleh profesionalisme yang tangguh dan tanggap, tidak sekedar bersikap reaktif tetapi mampu secara aktif, kreatif, dan antisipatif berperan dan berprakarsa.<sup>25</sup>

Dengan melihat sudut pandang ini Indonesia sebagai negara yang juga memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan nasional, termasuk perlindungan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri, diperlukan upaya yang mencakup kegiatan politik dan hubungan luar negeri yang berlandaskan ketentuan – ketentuan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Falsafah Pancasila, Pembukaan dan Batang Tubuh Undang – Undang Dasar 1945 serta Garis – Garis Besar Haluan Negara.

---

<sup>25</sup> Lihat Penjelasan atas Undang – Undang RI No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Surya Yudha Regif : Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Thailand Pasca Kudeta Militer Thailand Pada Tahun 2006 Dalam Ruang Lingkup Asean, 2009.

Dasar pemikiran yang melandasi undang – undang tentang hubungan luar negeri adalah bahwa penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri memerlukan ketentuan – ketentuan yang secara jelas mengatur segala aspek yang menyangkut sarana dan mekanisme pelaksanaan kegiatan tersebut.

Dalam dunia yang makin lama makin maju sebagai akibat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara global, serta meningkatnya interaksi dan interdependensi antanegara dan antarbangsa, maka makin meningkat pula hubungan internasional yang diwarnai dengan kerjasama dalam berbagai bidang. Kemajuan dalam pembangunan yang dicapai Indonesia di berbagai bidang telah menyebabkan makin meningkatnya kegiatan Indonesia di dunia Internasional, baik dari pemerintah maupun swasta/perseorangan, membawa akibat perlu ditingkatkannya perlindungan terhadap kepentingan negara dan warga negara.

Hubungan antar negara, politik luar negeri dan diplomasi merupakan tiga kegiatan yang saling berkaitan dalam usaha setiap warga untuk menjamin kepentingan – kepentingannya dan mencapai tujuannya. Pemerintah menentukan urutan prioritas kepentingan yang hendak dipertahankan dan tujuan yang hendak dicapai. Adapun cara pendekatan dan pelaksanaannya dirumuskan dalam suatu kebijaksanaan luar negeri. Vitalitas usaha untuk melaksanakan kebijaksanaan tersebut dilakukan melalui diplomasi yang bagi indonesia berciri sebagai diplomasi perjuangan.

Orientasi, peran dan tujuan terdiri dari pandangan, sikap terhadap dunia luar, keputusan dan aspirasi pembuat kebijakan. Akan tetapi, kebijakan juga mengandung

komponen *tindakan*, yakni hal yang dilakukan pemerintah kepada pihak lain untuk

Surya Yudha Regif : Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Thailand Pasca Kudeta Militer Thailand Pada Tahun 2006 Dalam Ruang Lingkup Asean, 2009.

menghasilkan orientasi, memenuhi peran atau mencapai dan mempertahankan tujuan tertentu. Tindakan pada dasarnya merupakan satu bentuk komunikasi yang dimaksudkan untuk mengubah atau mendukung perilaku pemerintah Negara lain yang sangat berperan untuk menentukan berhasil tidaknya pencapaian tujuan pemerintah yang bersangkutan. Tindakan dapat juga dianggap sebagai “isyarat” yang dikirimkan oleh seorang aktor untuk mempengaruhi pandangan si penerima mengenai si pengirim.<sup>26</sup> Hal ini tercipta dalam diplomasi, praktek diplomasi dapat dibentangkan sebagai “penyelenggaraan bisnis internasional oleh para diplomat” atau dapat pula diibaratkan sebagai “seni yang diselenggarakan seorang diplomat”. Diplomasi dikatakan seni, karena ia adalah usaha untuk membuat orang lain menerima jalan kita. Ernest Satow merumuskan sebagai “ penggunaan kecerdasan dan kelincahan dalam pelaksanaan hubungan resmi antara pemerintah dari negara-negara yang merdeka. Fungsi diplomasi sebagai usaha untuk mengelola dan mempertahankan perdamaian. Diplomasi dijalankan untuk memupuk, mempertahankan dan mengembangkan persahabatan, saling pengertian, serta kerja sama dan menangani masalah-masalah yang belum disetujui bersama hingga kesesuaian paham. Diplomasi dapat dianggap berhasil hanya bila pihak yang diajak berunding dapat diyakinkan untuk menerima atau mendekati posisi kita, hingga tercapai suatu kompromi yang memuaskan kedua belah pihak. Sukses dalam Diplomasi dipengaruhi oleh ketrampilan para diplomat untuk mengetahui lingkungan wilayah kerjanya seperti sifat, martabat, cita-cita, dan perjuangan dari rakyat negara dimana dia ditugaskan,

---

<sup>26</sup> Holsti K.J., *Politik Internasional*, Edisi keempat Jilid I, Jakarta ; Erlangga., 1988., Hal.158

Surya Yudha Regif : Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Thailand Pasca Kudeta Militer Thailand Pada Tahun 2006 Dalam Ruang Lingkup Asean, 2009.



situasi politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan negara itu serta struktur, kekuatan dan kelemahan dari pemerintah setempat.

Tugas diplomat dibatasi oleh politik dari pemerintah yang ia wakili, diplomat memberikan sumbangan terhadap politik luar negeri dengan laporan masalah dan anjuaran yang disampaikan kepada Menlu, perundingan yang dilakukan oleh seorang diplomat bukan perundingan pribadi namun melainkan perundingan antar negara dimana masing-masing diplomat membawa tugas yang isinya politik luar negeri masing-masing negara dimana ia ditempatkan ataupun sedang berunding.

Suatu defenisi yang standar menyatakan bahwa politik luar negeri itu adalah politik untuk mencapai tujuan nasional dengan menggunakan segala kekuasaan dan kemampuan yang ada. Interaksi antara tujuan nasional dengan sumber-sumber yang digunakan adalah subjek yang kekal dari ilmu kenegaraan.<sup>27</sup>

Di negara-negara demokrasi terdapat apa yang disebut interest groups dan pressure gropus. Struktur politik dan ekonomi serta kepribadian nasional suatu bangsa, kebudayaan, ideology, sejarah masa lampau dan lokasi geografiknya mempunyai peranan dalam penentuan politik luar negeri. Apalagi suatu bangsa mendapatkan tantangan dari luar, maka hal ini pasti mempunyai pengaruh dalam menyusun politik luar negeri suatu Negara. Struktur politik dan bentuk demokrasi yang ada dalam suatu negara memang sangat menentukan cara mengambil keputusan dalam politik luar negeri negara itu, apakah posisi negara itu dalam pertikaian dan persaingan di dunia, mempunyai sifat ofensif, defensive, imperialis, isolasionis,

---

<sup>27</sup> Yusuf, Suffri., *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri.*, Jakarta; Sinar Harapan., 1989., Hal. 110.

Surya Yudha Regif : *Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Thailand Pasca Kudeta Militer Thailand Pada Tahun 2006 Dalam Ruang Lingkup Asean*, 2009.



intervensionis, aligned (terikat), non-aligned (non-blok), netral dan sebagainya. Menguraikan politik luar negeri suatu negara dapat dilakukan melalui abstraksi-abstraksi, generalisasi, klasifikasi, perbandingan, dan evaluasi serta mencari sebab-sebab dari fenomena politik luar negeri tersebut.

Cara lain ialah menangani tiap-tiap isu dan kebijaksanaan sebagaimana adanya, sesuai dengan peraturan dan dinamika hal ikhwal tersebut. Penentuan putusan dalam politik luar negeri tergantung dari ideologi dan bentuk demokrasi dari suatu negara, yang mana adalah penting untuk diperhatikan kepribadian, tugas dan kewajiban pimpinan nasionalnya dan peranan pressure groups di negara itu, yang mempunyai daya tekanan secara phisikis terhadap mereka yang berkuasa. Setiap penguasa atau pemimpin suatu negara mempunyai pengaruh dalam penyusunan pola politik luar negeri suatu negara, adalah birokrasi sebagai aparat pemerintah, misalnya kelompok dinas luar negeri, kelompok pertahanan keamanan, kelompok intelejen, kelompok kebudayaan, kelompok perguruan tinggi negeri, kelompok studi mengenai strategi dan masalah internasional, kelompok peneliti ilmu pengetahuan dan sebagainya yang memberikan informasi dan argumentasi kepada pemerintah pusat atau pimpinan nasional negara. Faktor-faktor yang turut menentukan sifat dan bentuk politik luar negeri suatu negara yang antara lain : sistem politik, ekonomi, dan sosial suatu negara mempunyai pengaruh terhadap penyusunan politik luar negeri dari negara itu.

Politik luar negeri dari suatu negara merupakan iringan kebijaksanaan disertai rentetan tindakan yang rumit tetapi dinamis, yang ditempuh oleh negara itu dalam hubungannya dengan negara-negara lain atau sebagai kegiatannya dalam organisasi-

Surya Yudha Regif : Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Thailand Pasca Kudeta Militer Thailand Pada Tahun 2006 Dalam Ruang Lingkup Asean, 2009.

organisasi regional dan internasional.<sup>28</sup> Politik luar negeri itu bukanlah hanya merupakan merupakan jumlah dari kebijaksanaan-kebijaksanaan dari bidang luar negeri saja, tetapi lebih dari itu ia juga mengandung kewajiban-kewajiban, tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan prinsip-prinsip yang dianggap benar yang terdapat di belakang politik luar negeri tersebut.

Tiap-tiap pemerintah negara mempunyai semacam hubungan dengan pemerintah dari negara-negara tetangganya dan pemerintah itu menetapkan suatu pola cara bertetangga dengan menentukan tindakan-tindakan yang perlu diambil atau tidak perlu di ambil terhadap pemerintah lain dan ini semua dapat disebut politik luar negeri. Tindakan politik dan kekuatan politik memerlukan dua buah unsur di belakangnya antara lain : Ideologi dan Organisasi Pemerintahan. Ideologi diterjemahkan oleh aparatur-aparatur nasional yang terorganisasikan atas dasar perjuangan rakyat.

Penggunaan politik luar negeri sendiri sebagai unsur ideologi, dapat berkisar antara sistem yang disusun secara sungguh-sungguh dan menyeluruh atau sebagai konsep yang ditujukan hanya untuk kelangsungan hidup suatu bangsa saja, malah ada kalanya hanya untuk penerusan posisi atau kedudukan suatu pemerintahan (rezim) tertentu saja.

Faktor positif, baik yang material maupun yang spiritual merupakan syarat dan penunjang bagi politik luar negeri, misalnya kemampuan industri, letak geografis negara, jumlah dan watak penduduk, keadaan ekonomi, pola kebudayaan suatu bangsa, organisasi-organisasi politik, kesiap-siagaan angkatan bersenjata, tradisi-

---

<sup>28</sup> Yusuf,Suffri.,*Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri.*,( op cit ) Hal.113

Surya Yudha Regif : Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Thailand Pasca Kudeta Militer Thailand Pada Tahun 2006 Dalam Ruang Lingkup Asean, 2009.

tradisi historik, disiplin nasional, dan sebagainya. Dengan demikian sasaran dari politik luar negeri mungkin hanya dapat dicapai bila faktor-faktor itu diserasikan dengan tujuan atau dengan perkataan lain sasaran itu ditentukan oleh faktor-faktor. Politik luar negeri bersamaan dengan hukum internasional meliputi segala macam hubungan antara negara-negara, baik politik, ekonomi, sosial budaya maupun keamanan.<sup>29</sup> Dalam pelaksanaan politik dan hubungan luar negeri adanya suatu kepentingan nasional yaitu tujuan umum yang dari semula sampai tingkat terakhir diperjuangkan oleh suatu bangsa. Sasaran yang ditarik dari kepentingan nasional, adalah kondisi yang ingin dicapai dengan berbagai upaya dalam suatu kurun waktu dan kebijaksanaan adalah pemikiran dibelakang pelaksanaan rencana untuk mencapai sasaran. Prinsip adalah penentuan nilai-nilai yang dipakai sebagai pedoman bagi tingkah laku suatu bangsa atau negara.

Kebijaksanaan-kebijaksanaan yang disusun dan keputusan-keputusan yang diambil dalam bidang politik luar negeri ditentukan oleh manusia dan manusia itu didorong oleh kepentingan-kepentingan tertentu dan pandangan hidupnya. Oleh karena itu, politik luar negeri sangat tergantung dari ideologi bangsa dan untuk mengetahui strategi atau sasaran jangka panjang dari politik luar negeri suatu negara.

Ideologi suatu masyarakat yang berjuang, ialah sikap masyarakat itu terhadap dunia sekelilingnya dan merupakan suatu sistem nilai dan pandangan mengenai masalah politik, ekonomi dan sosial yang ada disekeliling masyarakat tersebut. Ideologi ini berlandaskan sistem nilai dan falsafah yang terdapat di dalam konsep kebudayaan dan sejarah suatu bangsa. Dalam memperjuangkan kepentingan nasional

---

<sup>29</sup> Yusuf, Suffri., *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri.*, ( op cit ) Hal.113-114

Surya Yudha Regif : *Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Thailand Pasca Kudeta Militer Thailand Pada Tahun 2006 Dalam Ruang Lingkup Asean*, 2009.

biasanya terdapat 2 (dua) aliran, yakni aliran realistik yang menghendaki perimbangan kekuatan, perimbangan deterrent, jaminan integritas teritorial dan sebagainya, dan aliran idealis yang menghendaki adanya ketertiban dunia, kepentingan bersama, keadilan dunia berdasarkan hukum, pengertian atas dasar perundingan dan lain-lain. Kedua macam pendekatan ini tidak selalu dipraktekkan secara konsekuen dan terpisah, tetapi tergantung dari situasi dan kondisi keadaan, dipergunakan secara silih berganti atau digabung dalam waktu yang bertepatan. Strategi atau siasat pencapaian sasaran jangka panjang adalah usaha untuk menggunakan seluruh sumber negara dan bangsa guna tercapainya tujuan nasional yang diselaraskan dan dikaitkan dengan faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, teknologi, psikologi dan militer. Sasaran jangka panjang hanya dapat dicapai secara bertahap melalui sasaran-sasaran jangka menengah atau yang disebut tactical objectives. Program, promosi, dan propaganda, merupakan bagian sasaran jangka pendek atau singkat.

Pelaksanaan politik luar negeri, arah, bentuk dan putusan mengenai politik luar negeri itu ditetapkan oleh Pemerintah dibawah Pimpinan Nasional, yang dilaksanakan oleh menteri luar negeri dengan mempergunakan aparat yang ada di bawah kekuasaan kewenangannya. Pelaksanaan memerlukan perencanaan yang disiapkan oleh segenap jajaran petugas di Kementrian dan Perwakilan Luar Negeri, mulai dari tingkat atas sampai tingkat bawah, hal ini harus mempunyai sistem yang tersusun secara terperinci, karena penyelenggaraan politik dan hubungan luar negeri itu adalah suatu proses yang berlangsung secara terus menerus dan menghendaki

pengamatan keadaan yang setiap waktu dapat berubah-ubah. Pelaksanaan bukanlah

Surya Yudha Regif : Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Thailand Pasca Kudeta Militer Thailand Pada Tahun 2006 Dalam Ruang Lingkup Asean, 2009.



hanya merupakan keputusan taktik belaka guna mengatasi peristiwa mendesak saja, tetapi harus dilandaskan kepada suatu siasat yang dapat memperkirakan kemungkinan timbulnya masalah-masalah, sebelum masalah-masalah itu menjadi peristiwa darurat bagi negara kita. Dengan demikian tindakan kita akan mempunyai arah yang jelas dan tidak mengambang tanpa tujuan.

Proses pengambilan keputusan akan terlambat dan keputusan-keputusan kurang tepat, apabila tindakan-tindakan persiapan tersebut tidak dilakukan. Setelah keputusan diambil, selanjutnya perlu adanya kemampuan untuk mengadakan evaluasi, yakni meninjau kebijaksanaan yang telah dirumuskan serta keputusan yang telah diambil itu dan kemudian mengetahui apakah ini sudah dilaksanakan, dan seterusnya perlu ditinjau lagi apakah pelaksanaannya sudah tepat, sejalan dengan rencana atau tidak.

Evaluasi ini ditujukan untuk mengamati pelaksanaan dari keputusan tersebut secara terus menerus dan bila perlu diadakan peninjauan kembali dengan mengikuti perubahan situasi dan kondisi di luar negeri. Dengan demikian sesuatu keputusan dapat diubah atau dicabut kembali oleh karenanya pelaksanaan politik luar negeri perlu diartikan sebagai penyusunan rencana yang menyeluruh, terarah dan terpadu didasarkan pada ilmu pengetahuan dan pengalaman. Dengan perkataan lain bahwa pelaksanaan itu merupakan suatu siklus perencanaan dan evaluasi atau proses yang berkelanjutan dan berkesinambungan.



## **B. Diplomasi dan Politik Luar Negeri Indonesia serta tujuan kepentingan nasional di Kawasan ASEAN**

Politik Luar Negeri pada hakekatnya, merupakan alat suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Kebijakan luar negeri merupakan suatu aspek cita – cita suatu bangsa dan oleh karenanya politik luar negeri merupakan aspek pula dari strategi nasional dan harus sesuai dengan tujuan nasional beserta sasaran – sasarannya yang jangka pendek dan yang jarak panjang. Sebagai pencerminan dari keadaan dalam negeri dan penentu kebijaksanaan luar negeri, maka politik luar negeri meliputi pula segala tindakan – tindakan yang dijalankan oleh oleh penguasa negara untuk berpengaruh atas beberapa keadaan di luar batas- batas yuridiksinya. Segala tindakan – tindakan itu dijalankan atas dasar pertimbangan akan kenyataan tidak adanya sahabat atau musuh yang tetap melainkan hanya kepentingan yang tetap. Pertimbangan *Keuntungan Nasional* inilah yang mempengaruhi cita – cita dan aspirasi bangsa serta negara yang menentukan sikapnya terhadap negara tetangganya, yang dekat ( Negara – negara ASEAN ) dan yang jauh ( Negara – negara Industri ) dan yang menentukan pula cara – caranya bagaimana aspirasi dan wawasan nasionalnya diterjemahkan dalam bentuk – bentuk nyata dan berwujud.

Pelaksanaan politik luar negeri sesuai dengan kepentingan nasional itu dipengaruhi oleh bermacam – macam faktor yang sebagian lagi bersifat konstan dan objektif. Di antara faktor konstan termasuk antara lain letak geografis sesuatu negara.

Faktor – faktor variabel yang berpengaruh atas kepentingan nasional dan pelaksanaan politik luar negeri sehingga memaksakan diadakannya perubahan atau penyesuaian karena terjadinya situasi yang baru adalah sebagai berikut :

Surya Yudha Regif : Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Thailand Pasca Kudeta Militer Thailand Pada Tahun 2006 Dalam Ruang Lingkup Asean, 2009.

a. Peranan struktur politik – ekonomi dalam menentukan sikap luar negeri suatu negara.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa negara – negara yang struktur politik – ekonominya yang berpaham tertentu misalnya komunis akan menjalin hubungan persahabatan dengan negara yang ideologi struktur politik yang sama pula sedangkan negara – negara ber – ideologi liberal lebih condong terbuka oleh negara – negara lainnya terutama negara pemberi bantuan ekonomi dan keuangannya.

Sejarah telah membuktikan bahwa kepentingan nasional sesuatu negara dapat menyebabkan perubahan politik luar negerinya yang menyimpang dari sikapnya yang tradisional.

b. Pengaruh negara – negara besar atas situasi – kondisi suatu wilayah, terutama wilayah Asia Tenggara yang untuk sekian lamanya merupakan arena rivalitas internasional para negara besar.

Untuk sekian lamanya, kepentingan nasional para negara – negara Asia Tenggara masing – masing telah dipaksakan untuk disesuaikan dengan kepentingan yang lebih lebih luas dari para negara – negara besar. Meskipun negara – negara besar masih tetap berusaha untuk mempertahankan peranannya yang semula, negara – negara Asia Tenggara pada taraf kemajuannya yang sekarang akan berusaha secara terus – menerus untuk menjalankan politik nasionalnya yang bebas dari pengaruh negara – negara

besar itu. Dalam hubungan berpengaruhnya lingkungan atas kemajuan negara

– negara di wilayah Asia Tenggara, dengan peningkatan pentingnya aspek – aspek politik, ekonomi dan militer. Peta kewilayahan yang lebih menguntungkan wilayah Asia Tenggara dimana kepentingan negara – negara besar terletak disana karena Negara – negara Asia Tenggara menguasai jalur kepentingan perdagangan negara – negara besar, dengan kata lain untuk menjaga kepentingan ekonomi maupun politik negara – negara besar tanpa mengambil wilayah salah satu negara Asia Tenggara maka negara – negara besar memberikan bantuan ekonomi maupun militer dengan nilai tukar adalah negara yang diberikan bantuan bisa menjaga kepentingan ekonomi maupun politik negara – negara besar.

c. perwujudan suatu identitas regional memerlukan penanggulangan dampak sejarah dan politik atas perkembangan wilayah Asia Tenggara sebagai suatu keseluruhan.

Sebagai suatu kenyataan dapat dikatakan bahwa kesadaran regional dapat lebih mudah dicapai dalam bidang ekonomi, sedangkan kerjasama dalam bidang ekonomi, sedangkan kerjasama dalam bidang – bidang politik dan militer antar negara – negara di wilayah Asia Tenggara untuk beberapa waktu masih akan berada di luar pelaksanaan politik luar negeri pada tingkat regional. Dalam waktu yang mendatang, kerjasama dalam bidang – bidang politik dan militer ini masih akan merupakan kelanjutan dari usaha untuk meningkatkan identitas nasional masing – masing negara di wilayah itu.

Pengaruh kepentingan nasional akan merupakan suatu faktor penting dalam

mewujudkan suatu bentuk identifikasi regional. Dalam hal ini, yang menjadi lebih penting bagi kelangsungan hidup negara – negara di wilayah Asia Tenggara dengan beraspirasi tidak lagi dianggap sebagai obyek dalam diplomasi dunia melainkan sebaliknya, yaitu beraspirasi menjadi subjek yang aktif dalam dunia internasional untuk mengurangi pengaruh dari negara – negara besar.

d. Bidang – bidang kepentingan bersama bagi semua negara di wilayah Asia Tenggara sesuai dengan kedudukan mereka sebagai negara – negara berkembang.

Di antara negara – negara di wilayah Asia Tenggara pada waktu sekarang terdapat persetujuan yang luas dalam beberapa masalah yang spesifik seperti hukum laut, gerakan Non-Blok ( non – alignment ), narkoba dan sebagainya. Disamping ini terdapat pula kemufakatan mengenai masalah – masalah ekonomi yang pada umumnya berpengaruh atas produksi yang primer, dalam bidang mana terdapat suatu sikap bersama terhadap dunia luar.<sup>30</sup>

Untuk memastikan tercapainya tujuan nasional, Departemen Luar Negeri menekankan pada kerja sama diplomatik dengan negara-negara di dunia internasional dalam seri lingkaran konsentris (concentric circles) yang terdiri dari: Lingkaran pertama adalah Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) yang merupakan pilar utama bangsa Indonesia dalam menjalankan politik luar negerinya. Dengan

---

<sup>30</sup> Kusumaatmadja, mochtar, (op cit) ,Hal.7.

Surya Yudha Regif : Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Thailand Pasca Kudeta Militer Thailand Pada Tahun 2006 Dalam Ruang Lingkup Asean, 2009.

forum-forum tersebut Indonesia dapat menerapkan diplomasinya untuk memperkuat usaha bersama dalam rangka menjembatani kesenjangan antara negara-negara berkembang dengan negara maju. Sementara itu, pada level global, Indonesia mengharapkan dan menekankan secara konsisten penguatan multilateralisme melalui PBB, khususnya dalam menyelesaikan segala permasalahan perdamaian dan keamanan dunia. Indonesia juga menolak segala keputusan unilateral yang diambil di luar kerangka kerja PBB.

Penerapan politik luar negeri bebas - aktif tersebut juga harus disesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis baik di tingkat global maupun regional yang sangat mempengaruhi penekanan kebijakan luar negeri Indonesia. Politik Luar Negeri Indonesia didesain untuk mampu mempertemukan kepentingan nasional Indonesia dengan lingkungan internasional yang selalu berubah. Tidak dapat dipungkiri perlunya Politik Luar Negeri yang luwes dan flexible untuk menghadapi segala tantangan dimaksud. Perubahan lingkungan internasional tersebut tidak hanya disebabkan oleh dinamika hubungan antar negara tetapi juga perubahan isu, dan munculnya aktor baru dalam hubungan internasional yang berupa non-state actors.

Fenomena saling ketergantungan antar negara dan saling keterkaitan antar masalah memang telah terlihat dalam interaksi hubungan internasional. Hal ini tercermin dari pembentukan kelompok kerja sama regional baik berlandaskan kedekatan geografis maupun fungsional yang semakin meluas. Demikian pula, saling keterkaitan antar masalah juga terlihat dari pembahasan topik-topik global pada agenda internasional yang cenderung membahas isu-isu yang menyangkut hak asasi

manusia (HAM), intervensi humaniter, demokrasi dan demokratisasi, “good  
Surya Yudha Regif : Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Thailand Pasca Kudeta Militer Thailand Pada Tahun 2006 Dalam Ruang Lingkup Asean, 2009.



governance” dan anti-korupsi, lingkungan hidup, masalah tenaga kerja, kejahatan transnasional seperti terorisme dll. Fenomena tersebut di atas diikuti pula oleh fenomena globalisasi yang semakin meluas, dimana globalisasi merupakan arus kekuatan yang dampaknya tidak dapat dielakkan oleh negara manapun di dunia. Globalisasi telah membawa berbagai peluang besar bagi kemajuan perekonomian negara-negara yang dapat memanfaatkannya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi pada kenyataannya juga memiliki dampak yang merugikan, khususnya bagi negara-negara yang belum atau kurang mampu memanfaatkan kesempatan yang tersedia.

Situasi politik dan keamanan dunia pasca perang dingin relatif stabil dalam pengertian tidak ada perang besar yang terjadi, namun terjadi proxy war di beberapa kawasan. Dalam perkembangan terakhir, kawasan Asia dan Pasifik relatif aman dan stabil. Proses demokratisasi yang mulai tumbuh dan menguat di wilayah-wilayah konflik dapat dijadikan titik awal yang sangat diperlukan demi terciptanya penyelesaian konflik-konflik tersebut. Selain konflik-konflik eksternal, konflik - konflik internal di berbagai belahan dunia juga relatif mereda. Misalnya saja Indonesia yang dapat menyelesaikan konflik di Aceh dengan cara-cara damai. Banyak pihak yang menilai bahwa penyelesaian masalah di Aceh dapat dijadikan salah satu contoh yang baik dalam menyelesaikan konflik internal suatu negara.

Dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan kontradiksi inilah yang menjadi lingkungan strategis di mana diplomasi Indonesia dapat dijalankan secara tepat dan menyeluruh. Peluang untuk memanfaatkan kesempatan yang terbuka dari era

globalisasi ini, akan tergantung pada kedekatan faktor-faktor internasional dengan

Surya Yudha Regif : Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Thailand Pasca Kudeta Militer Thailand Pada Tahun 2006 Dalam Ruang Lingkup Asean, 2009.

faktor-faktor domestik (intermestik) kita. Kemajuan dari proses reformasi dan demokratisasi telah memungkinkan Indonesia menjadi negara yang lebih siap dalam menghadapi proses globalisasi dan mampu menempatkan dirinya tanpa ada rasa kecanggungan dalam arus utama dari masyarakat global.

Proses integrasi negara-negara kawasan Asia Timur semakin berkembang pesat. Hal ini tidak terlepas dari peran penting ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara. Rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN IX telah menyepakati pembentukan ASEAN Community pada tahun 2020 yang bersandikan pada tiga pilar (komunitas ekonomi, politik keamanan dan sosial budaya), serta kesepakatan mengenai rencana-rencana aksi untuk masing-masing pilar tersebut. Selain itu, KTT ASEAN + 3 di Vientiane juga telah menghasilkan kesepakatan untuk memprakarsai penyelenggaraan KTT Asia Timur (East Asian Summit) pertama yang telah diadakan di Malaysia pada tahun 2005 lalu dan yang terbaru menghasilkan kesepakatan pembentukan dewan HAM ASEAN di tahun 2009. Hal tersebut telah menegaskan ASEAN sebagai pemegang peran kendali dalam proses integrasi di kawasan Asia Timur.

Melihat berbagai perkembangan lingkungan strategis baik ditingkat internasional maupun regional, untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia Deplu menjalankan total diplomasi yang digagas oleh Menlu Hassan Wirayudha.

Upaya untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia di dunia Internasional dilaksanakan melalui diplomasi. Dengan total diplomasi Diplomasi Indonesia yang dilaksanakan oleh Departemen Luar Negeri (Deplu) turut mengaktualisasikan

program dan prioritas Kabinet Indonesia Bersatu yang pada intinya adalah melakukan

Surya Yudha Regif : Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Thailand Pasca Kudeta Militer Thailand Pada Tahun 2006 Dalam Ruang Lingkup Asean, 2009.

diplomasi total untuk ikut mewujudkan Indonesia yang bersatu, lebih aman dan damai, adil, demokratis dan sejahtera. Dalam lingkup tugas dan kompetensi utama Deplu sebagai penyelenggara hubungan luar negeri, Deplu berupaya melibatkan seluruh komponen pemangku kepentingan untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepentingan nasional Indonesia diterjemahkan kedalam visi Departemen luar negeri yang disebut sebagai “Sapta Dharma Caraka”, yaitu:

- (1) Memelihara dan meningkatkan dukungan internasional terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan Indonesia;
- (2) membantu pencapaian Indonesia sejahtera melalui kerja sama pembangunan dan ekonomi, promosi dagang dan investasi, kesempatan kerja dan alih teknologi;
- (3) meningkatkan peranan dan kepemimpinan Indonesia dalam proses integrasi ASEAN, peran aktif di Asia-Pasifik, membangun kemitraan strategis baru Asia-Afrika serta hubungan antar sesama negara berkembang;
- (4) memperkuat hubungan dan kerja sama bilateral, regional dan internasional di segala bidang dan meningkatkan prakarsa dan kontribusi Indonesia dalam pencapaian keamanan dan perdamaian internasional serta memperkuat multilateralisme;
- (5) meningkatkan citra Indonesia di masyarakat internasional sebagai negara demokratis, pluralis, menghormati hal asasi manusia, dan memajukan perdamaian dunia;
- (6) meningkatkan pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI)

di luar negeri serta melancarkan diplomasi kemanusiaan guna mendukung tanggap darurat dan rekonstruksi Aceh dan Nias dari bencana gempa dan tsunami;

- (7) melanjutkan benah diri untuk peningkatan kapasitas kelembagaan, budaya kerja dan profesionalisme pelaku diplomasi serta peranan utama dalam koordinasi penyelenggaraan kebijakan dan hubungan luar negeri.

Tujuan Kepentingan Nasional antara lain :

1. Memelihara dan meningkatkan dukungan internasional terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan Indonesia.

Berkaitan dengan hal pemeliharaan dan peningkatan dukungan internasional terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan Indonesia, diplomasi Indonesia telah memainkan peranan penting semenjak masa perjuangan untuk merebut kemerdekaan. Pada waktu itu, diplomasi Indonesia telah berhasil mencari dukungan dan pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Lebih lanjut, diplomasi juga memainkan peranan penting dalam menjaga keutuhan NKRI. Upaya ini dilakukan baik melalui diplomasi bilateral maupun multilateral. Dengan perubahan lingkungan internasional dan regional, upaya pencapaian kepentingan nasional dalam hal ini mendapatkan hambatan dengan munculnya aktor-aktor baru dalam hubungan internasional. Dukungan NGOs terhadap separatisme dan pemberitaan media massa untuk pembentukan opini internasional semakin menyulitkan upaya diplomasi Indonesia.

2. Membantu pencapaian Indonesia sejahtera melalui kerja sama pembangunan dan ekonomi, promosi dagang dan investasi, kesempatan kerja dan alih teknologi.

Secara bertahap krisis ekonomi di Indonesia telah berkembang menjadi krisis yang bersifat multidimensi yang melibatkan unsur sosial, politik, etnis, terutama masalah disintegrasi bangsa. Merosotnya nilai rupiah hingga ke titik terendah didorong oleh krisis kepercayaan pihak investor, baik domestik maupun asing terhadap kredibilitas pemerintah yang saat itu tampaknya tidak berdaya dalam menanggulangi masalah tersebut. Stabilitas keamanan yang tidak menentu menimbulkan keraguan investor untuk melanjutkan penanaman modalnya di Indonesia dan tingginya resiko berusaha yang disebabkan oleh melonjaknya inflasi. Sektor perdagangan terutama ekspor dan impor, yang selama ini mendatangkan devisa utama dalam perekonomian Indonesia, mengalami hambatan yang cukup besar. Demikian juga investasi sebagai suatu bagian tak terpisahkan dari sektor perdagangan. Indonesia kehilangan sumber foreign exchange yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai transaksi dalam kegiatan ekonomi internasionalnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini telah mencapai angka 5,5% ternyata masih berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Indikasi pulihnya perekonomian Indonesia, menuntut perhatian yang cukup besar dari pemerintah. Namun angka pertumbuhan tersebut belum cukup bagi upaya



Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan, mengatasi pengangguran dan peningkatan mutu pendidikan. Meskipun konsumsi dan investasi asing langsung cukup memberikan kontribusi bagi pertumbuhan tersebut selama tahun 2005, namun masuknya investasi asing di Indonesia masih relatif rendah. Oleh sebab itu penataan kembali perekonomian Indonesia dari sisi makro perlu dilakukan secepatnya agar kegiatan ekonomi mikro, seperti sektor industri/manufaktur dapat bertahan dan kembali berjalan dengan baik. Manajemen yang baik sangat diperlukan dan waktu yang dibutuhkan untuk kembali mencapai semuanya itu cukup panjang.

Pengertian diplomasi ekonomi internasional adalah segala upaya untuk menjalin, meningkatkan dan memanfaatkan hubungan atau kerjasama dan apabila diperlukan dengan menggunakan kekuatan politik, untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi. Seperti yang telah ditekankan, bahwa politik luar negeri Indonesia dirumuskan untuk memperjuangkan suatu kepentingan melalui hubungan atau kerjasama dengan bangsa-bangsa di dunia. Kepentingan tersebut dapat bersifat global, regional dan nasional.

3. Meningkatkan peranan dan kepemimpinan Indonesia dalam proses integrasi ASEAN, peran aktif di Asia-Pasifik, membangun kemitraan strategis baru Asia-Afrika serta hubungan antar sesama negara berkembang.

Salah satu peran penting Indonesia dalam rangka mempertahankan dan menjaga stabilitas regional adalah dengan berpartisipasi aktif di ASEAN

dalam Asean Regional Forum (ARF), East Asia Summit (EAS) serta secara berkesinambungan meningkatkan hubungan kerja sama di berbagai bidang dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan. Dalam setiap partisipasinya, Indonesia selalu menekankan dan memprioritaskan cara-cara damai (confidence building measures) dalam menyelesaikan segala macam bentuk konflik yang terjadi dengan tetap berpegang teguh pada prinsip politik luar negeri bebas aktif dan secara konsisten terus mendukung setiap usaha menjaga perdamaian di kawasan dengan memperhatikan prinsip-prinsip penghormatan terhadap integritas wilayah dan kedaulatan negara.

Sebelumnya telah disebutkan bahwa ASEAN merupakan pilar utama bagi politik luar negeri Indonesia. Itu artinya bahwa ASEAN berfungsi sebagai kendaraan utama bagi Indonesia untuk melaksanakan hubungan luar negeri atau kerja sama negara-negara kawasan Asia Tenggara dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Melalui ASEAN, Indonesia juga dapat memproyeksikan norma dasarnya –prinsip regional resilience and non-interference- terhadap wilayah sekitar kawasan. Oleh karena itu, lingkungan yang kondusif dapat diciptakan secara kolektif untuk kemajuan ekonomi bersama. Walaupun terdapat perbedaan budaya, kondisi geografis, sistem politik dan tingkat kesejahteraan, negara-negara anggota ASEAN telah menunjukkan kesamaan etiked dalam mengutamakan kerja sama untuk mencapai keuntungan dan kemakmuran bersama. Berdasarkan hal ini, diplomasi luar negeri Indonesia di era globalisasi harus dapat membangun dan

memelihara kerja sama yang lebih luas dan efektif untuk memperoleh

kemajuan yang substantif dalam penyelesaian konflik dan integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan kondisi alamnya, kemampuan ekonomi dan kemauan politiknya untuk bergabung dalam proses regional, Indonesia akan terus memainkan peran strategis demi kemajuan dan terciptanya integrasi ASEAN. Peranan Indonesia di Asia Tenggara diperkuat dengan partisipasinya untuk menyelesaikan konflik di Kamboja dan Filipina Selatan serta ikut menjadi anggota dalam pasukan perdamaian PBB. Indonesia juga memiliki inisiatif untuk melaksanakan diplomasi kemanusiaan dan turut serta dalam proses pembentukan Masyarakat Asia Timur.

ASEAN Regional Forum (ARF) yang dilahirkan sebagai respon dari berakhirnya perang dingin yang menimbulkan ketidakpastian dalam hubungan internasional, ditandatangani pada tahun 1995. ARF didirikan untuk menjaga dan meningkatkan perdamaian dan keamanan di wilayah Asia-Pasifik melalui tiga tahap yaitu: confidence building measures (CBM), preventive diplomacy dan conflict resolution.

4. Memperkuat hubungan dan kerjasama bilateral, regional dan internasional di segala bidang dan meningkatkan prakarsa dan kontribusi Indonesia dalam pencapaian keamanan dan perdamaian internasional serta memperkuat multilateralisme.

Untuk melaksanakan pembangunan nasional, Indonesia memerlukan kondisi

lingkungan regional dan internasional yang kondusif. Untuk tujuan tersebut,

Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam memperkuat kerjasama bilateral, regional dan internasional dalam pencapaian keamanan dan perdamaian internasional serta memperkuat multilateralisme.

5. Meningkatkan citra Indonesia di masyarakat internasional sebagai negara demokratis, pluralis, menghormati hak asasi manusia, dan memajukan perdamaian dunia.

Upaya untuk meningkatkan citra Indonesia di masyarakat internasional dilakukan dengan promosi pariwisata dan budaya dengan berbagai negara di dunia. Selain berbagai pembicaraan tingkat tinggi, Indonesia juga mendorong hubungan antarmasyarakat atau disebut juga *people-to-people contact* terutama melalui pelatihan pertanian, pertukaran kebudayaan dan beasiswa seni-budaya. Promosi citra Indonesia ini juga dengan intensif dilakukan di seluruh belahan dunia.

6. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri serta melancarkan diplomasi kemanusiaan guna mendukung tanggap darurat tentang bencana alam yang menjadi tragedi kemanusiaan

Dalam rangka diplomasi kemanusiaan, Indonesia berhasil mengadakan

tsunami summit di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2005 berkenaan dengan

bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda beberapa negara di Kawasan Asia. Pertemuan ini bertujuan untuk menghasilkan penyelesaian secara transparan dan konkret dalam rangka membantu para korban yang sangat membutuhkan pertolongan dengan cepat. Masalah yang dibicarakan dalam pertemuan ini menyangkut beberapa hal seperti: bagaimana cara mengurangi beban bagi negara-negara yang terkena musibah tersebut; bagaimana cara pencegahan yang tepat untuk mengurangi angka kematian bilamana terjadi bencana yang serupa di masa yang akan datang; bagaimanakah peranan PBB beserta organisasi internasional lainnya; langkah-langkah apa yang mesti ditempuh untuk memastikan penggalangan dana yang berkelanjutan; serta bagaimana cara mengembangkan sistem peringatan dini yang efektif di kawasan negara-negara yang rawan bencana.

Pertemuan tersebut telah membangkitkan munculnya bantuan kemanusiaan masal dari masyarakat internasional, dimana salah satunya tercermin dari penawaran debt moratorium bagi Indonesia. Untuk memastikan efektifitas dari perolehan sumbangan, Pertemuan meminta PBB untuk menggerakkan dukungan internasional, dan menunjuk perwakilan khusus dari Sekretariat PBB untuk meningkatkan koordinasi antar negara-negara donor, organisasi internasional dan organisasi non-pemerintah dalam memberikan bantuan kepada pemerintah negara yang tertimpa musibah.

Diplomasi kemanusiaan tersebut berfokus pada usaha diplomasi Indonesia yang bertujuan untuk membangkitkan serta memelihara nilai-nilai etis dan

kemanusiaan dalam hubungan internasional, mempromosikan solidaritas



global dan mendorong perasaan “kekitaan” antar negara serta pada akhirnya adalah mengaktualisasikan usaha bersama dalam mengatasi tragedi kemanusiaan.

7. Melanjutkan benah diri untuk peningkatan kapasitas kelembagaan, budaya kerja dan profesionalisme pelaku diplomasi serta peranan utama dalam koordinasi penyelenggaraan kebijakan dan hubungan luar negeri.

Berbagai perencanaan kegiatan diplomasi di masa yang akan datang harus didukung dengan tata kelembagaan yang kuat dan kapasitas mesin diplomasi yang memadai baik dari segi sarana maupun sumber daya manusia yang berkualitas, dengan selalu menerapkan prinsip-prinsip good governance. Disamping melanjutkan proses penataan kelembagaan, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia akan terus memberikan perhatian dalam upaya menciptakan tertib fisik, administrasi, keuangan dan tertib waktu. Selain itu, pembenahan pengamanan jaringan komunikasi juga sangat diperlukan guna menciptakan misi diplomatik yang aman.

### **C. Diplomasi dan Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Thailand Pasca Kudeta**

Dinamika globalisasi telah membuka ruang bagi banyak aktor, baik negara maupun non negara, untuk mengambil peran. Spektrum hubungan internasional menjadi semakin terbuka, *flat* dan *accessible*. Kecenderungan itu diakui telah membawa implikasi dalam berbagai bentuk pergeseran, perubahan, persinggungan, dan adaptasi Negara ataupun non negara terhadap resonansi kepentingan masing-masing. Indonesia menyadari sepenuhnya interdependensi dalam konteks kecenderungan tersebut sebagai peluang dan tantangan. Sebagai peluang (*opportunity*), Indonesia berupaya mengartikulasikan peran, posisi, dan kepentingannya dengan mengedepankan pendekatan diplomasi total dalam berbagai lini. Sebaliknya, sebagai tantangan (*challenge*), Indonesia bertekad mempertahankan aktivitas hubungan luar negeri yang berlandaskan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang menjadi refleksi amanat UUD 1945. Diplomasi total merepresentasikan sinergi seluruh komponen bangsa dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) di dalam negeri. Orientasi praktis kebijakan itu adalah menempatkan substansi permasalahan secara integratif, terutama dalam perspektif internasional-domestik. Cara pandang tersebut menciptakan korelasi erat dan timbal balik antara dinamika hubungan internasional dan realitas domestik Indonesia dalam skala yang lebih luas. Dalam konteks ini, aksentuasi diplomasi Indonesia merupakan bagian integral dari kebijakan agenda Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) yang bertekad mewujudkan profil Indonesia yang lebih aman dan damai, adil dan demokratis, serta sejahtera.

Disamping itu Indonesia memiliki fondasi penyelenggaraan dan pelaksanaan

politik luar negeri yang bertumpu pada kepentingan nasional telah dijabarkan dalam program *Kabinet Indonesia Bersatu* (KIB) sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2004-2009. Jabaran tersebut merekapitulasi kepentingan nasional ke dalam tiga program prioritas yang difokuskan pada optimalisasi diplomasi Indonesia, peningkatan kerja sama internasional, dan komitmen perdamaian dunia. Departemen Luar Negeri merumuskan ketiga orientasi itu dalam formulasi visi kementerian yang diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri. Harapan tersebut tercermin dalam visi "*Melalui diplomasi total, ikut mewujudkan Indonesia yang bersatu lebih aman, adil, demokratis, dan sejahtera*". Berbagai langkah kebijakan dan hasil yang telah dicapai dalam penyelenggaraan politik dan hubungan luar negeri Indonesia mencerminkan peran Indonesia yang semakin meningkat. Profil Indonesia yang terus membaik telah mencerminkan tekad bersama untuk mengembangkan politik dan hubungan luar negeri yang sepenuhnya berlandaskan pada kepentingan nasional. Sejumlah langkah kebijakan utama yang telah dilaksanakan untuk mewujudkan pemantapan politik luar negeri dan kerja sama internasional antara lain adalah

- (1) Pelaksanaan tindak lanjut agenda pembentukan *ASEAN Community*,
- (2) Peningkatan peran diplomasi dalam menyelesaikan masalah perbatasan,
- (3) Upaya penyelesaian berbagai permasalahan HAM,
- (4) Pelaksanaan *inter-faith dialogue*,
- (5) Partisipasi aktif dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia,
- (6) Upaya perlindungan dan pelayanan WNI, dan
- (7) Peningkatan kerja sama bilateral dan multilateral untuk mendukung

kepentingan nasional, termasuk menjalin kemitraan strategis dengan berbagai negara.

Terkait dengan itu semua dan korelasi dasar Indonesia melaksanakan tugas diplomasi dan politik luar negeri, seiring dengan perkembangan politik terutama di wilayah regional semakin membuat Indonesia memiliki peran penting. Sebagai saka guru politik luar negeri Indonesia, kerja sama ASEAN masih merupakan prioritas utama Indonesia dalam menciptakan kestabilan dan kerja sama regional di kawasan Asia Tenggara. Stabilitas, keamanan, dan perdamaian kawasan merupakan modal dasar yang penting bagi pembangunan dalam negeri. Diplomasi Indonesia di kawasan Asia Tenggara dilakukan dengan menunjukkan kualitas peran kepemimpinan dan kontribusi konkret Indonesia dalam ASEAN sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat lingkaran konsentris pertama kebijakan politik luar negeri, melalui ide, konsep, dan prakarsa yang mampu menempatkan kembali Indonesia sebagai negara yang semakin diperhitungkan di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur.

Sebagai salah satu anggota ASEAN, Thailand merupakan suatu negara yang dipandang cukup baik itu dari segi ekonomi maupun politik. Peristiwa kudeta yang terjadi dan efek yang ditimbulkan juga berarti bagi politik kawasan dan kepentingan ASEAN. Apabila konflik tersebut terjadi terlalu lama dapat menimbulkan akibat yang buruk bagi negara-negara kawasan. Dan juga dikhawatirkan munculnya campur tangan dari pihak-pihak lain yang mengharapkan hubungan antar negara Asean tidak berjalan dengan baik. Melihat segala macam hal-hal yang dapat terjadi dari konflik internal yang terjadi di diharapkan segera ditemukan solusi untuk hal tersebut.

Diharapkan segera terbentuk segera pemerintahan yang stabil dan baik yang segera  
Surya Yudha Regif : Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Thailand Pasca Kudeta Militer Thailand Pada Tahun 2006 Dalam Ruang Lingkup Asean, 2009.



dapat berjalan di Thailand. Sehingga kerjasama-kerjasama bilateral dan regional yang selama ini sudah ada dapat terjaga dengan baik. Ketidakstabilan politik dalam negeri di Thailand berarti juga ketidakstabilan bagi kawasan, karena bisa mengancam masalah pertahanan dan keamanan bagi kawasan. Sementara kestabilan politik di Thailand berarti kestabilan juga bagi kawasan, baik itu kawasan regional maupun internasional.

Menyusul peristiwa yang terjadi di Thailand, Indonesia sebagai bagian dari perencanaan community ASEAN 2020 dan negara yang meratifikasi tujuan dari ASEAN Charter perlu melakukan suatu langkah yang cukup berarti bagi kemajuan ASEAN itu sendiri. Berpedoman pada politik luar negeri yang bebas dan aktif serta sebuah konstitusi bagi ASEAN sendiri yaitu piagam ASEAN yang berisikan aturan main dimana setiap anggota ASEAN harus dan wajib melaksanakan ketentuan tersebut. Pada dasarnya Asean Charter ini mengarahkan kepada para anggota agar mempunyai satu visi dan misi ke depan untuk memajukan kesejahteraan dan kelanggengan masyarakat di Asia Tenggara, khususnya negara-negara anggota Asean. Pertama kali Asean Charter ini di-draft-kan secara formal pada Asean Summit kesebelas yang diadakan di Kuala Lumpur tahun 2005. Pada saat itu, sepuluh negara anggota setuju untuk melanjutkan dan mematangkan konsep ini agar menjadi sebuah konstitusi bersama. Namun dengan dimasukkannya proposal mengenai HAM dan demokrasi, pada Asean Summit keduabelas tahun 2007, perbedaan pendapat antara negara anggota Asean mulai terjadi.

Pada tahapan ini mau tidak mau semua anggota yang telah meratifikasi harus menjunjung tinggi kesepakatan tersebut, maka dari sejak Thailand menandatangani Surya Yudha Regif : Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Thailand Pasca Kudeta Militer Thailand Pada Tahun 2006 Dalam Ruang Lingkup Asean, 2009.



persetujuan mengenai HAM dan Demokrasi yang ikut termasuk ke dalam Asean Charter, harus memiliki konsistensi karena demi kemajuan ASEAN itu sendiri.

Langkah – langkah Indonesia merespons pasca peristiwa kudeta dengan dapat diartikan sebagai langkah yang bukan untuk mencampuri urusan dalam negeri negara lain namun lebih kepada keberlangsungan keeratan dan kekuatan kawasan yang tidak mengurangi kepentingan dalam negeri Indonesia terhadap Thailand sesuai dengan yang disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia yang melihat sebuah peristiwa yang terjadi di Thailand merupakan peristiwa yang memprihatinkan dengan melihat perkembangan pasca terjadinya kudeta, Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi dalam politik kawasan oleh karena itu memandang perlu langkah – langkah yang cukup dekat dalam mengikuti perkembangan di Thailand. Pasca peristiwa kudeta diharapkan kepada pemerintahan pasca kudeta dapat mengambil kebijakan yang demokratis dalam menangani krisis politik Thailand agar bisa menjadi yang terbaik bagi kepentingan rakyat Thailand itu sendiri. Pertanggungjawaban dari politisi dalam negeri Thailand sangat diharapkan karena para elit politik di negeri gajah putih tersebut memiliki peranan penting dalam kestabilan politik yang orientasinya tidak membagi rakyat menjadi dua kubu yang berlawanan yang akhirnya bukan produktif melalui kompetisi namun kontra-produktif yang menghasilkan kekerasan – kekerasan yang baru tanpa mendapatkan solusi yang baik bagi kepentingan rakyat Thailand.<sup>31</sup>

Sebuah analisis bisa menjadi buah yang berharga dalam perkembangan politik di Indonesia, peristiwa yang terjadi di Thailand dapat menjadi sebuah referensi yang

---

<sup>31</sup> penyampaian resmi DEPLU RI pada saat jeda acara Sidang Umum PBB ke-61, New York, AS.

Surya Yudha Regif : Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Thailand Pasca Kudeta Militer Thailand Pada Tahun 2006 Dalam Ruang Lingkup Asean, 2009.

menghasilkan sebuah pelajaran berharga bagaimana efek dan dampak kudeta bagi Indonesia terutama politik. Kemelut yang terjadi di Thailand merupakan buah akumulasi dari ketidakpercayaan dan kekecewaan baik dari rakyat Thailand maupun para Elit politik, terutama pihak militer yang nota bene panglima angkatan bersenjata pada waktu kudeta adalah seorang muslim. Penyelesaian damai yang seharusnya ditempuh oleh pihak militer berbanding terbalik ketika kebijakan yang dijalankan oleh Thaksin di Thailand Selatan. Kemudian rotasi kepemimpinan yang tidak berjalan dengan berkala pada tubuh militer juga menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya kudeta.

Bagi Indonesia memiliki kepentingan dengan Thailand saling timbal balik dan hubungan ini merupakan keseriusan dari kedua belah pihak, dapat dilihat bahwa peranan politik luar negeri Indonesia dapat menjadi sebuah tekanan yang dapat menekan secara halus tanpa merusak hubungan kedua negara ketika pasca kudeta, Indonesia memberikan suatu usulan agar komitmen pemerintah Thailand untuk memulihkan demokrasi baik melalui penyusunan konstitusi, mengadakan pemilu dan pemulihan hak-hak kecil serta segera mencabut dalam waktu dekat situasi darurat di negeri Thailand.

Bagi Thailand ini merupakan usulan yang sangat berharga seperti yang disampaikan oleh pemerintahan Thailand pasca kudeta ketika berada di Istana Negara dalam kunjungannya ke Indonesia dengan membawa Menteri Luar Negeri Thailand, Menteri Perdagangan Thailand dan Duta Besar Thailand ini membuktikan bahwa adanya bentuk kepentingan baik itu politik dan ekonomi yang saling menguntungkan.

Dari segi politik, Thailand menyatakan bersedia menerima masukan Indonesia

dalam mengatasi konflik setelah peristiwa kudeta dan juga masalah yang terjadi di Thailand Selatan diselesaikan dengan jalan dialog melalui pertukaran ulama atau tokoh – tokoh Islam yang nantinya bukan saja pada tingkat perseorangan namun berkesinambungan hingga pada tingkat organisasi.

Dari segi ekonomi, Pada sektor ini Thailand dan Indonesia sepakat meningkatkan hubungan bilateral kedua negara, baik dibidang perdagangan dan investasi, termasuk didalamnya bidang kerjasama investasi dan perikanan bahwa Thailand menyatakan bersedia berinvestasi di Indonesia pada bidang perikanan.<sup>32</sup>

Dilihat dari dua segi ini menunjukkan bahwa Indonesia dan Thailand merupakan mitra yang bekerjasama dalam membangun kepentingan yang saling menguntungkan di kedua belah pihak disamping sektor – sektor lainnya. Indonesia membangun sebuah paradigma hubungan internasional yang didasarkan pada perdamaian dan keadilan sosial yang nantinya bermuara pada kesejahteraan rakyat Indonesia. Politik kawasan yang selalu berubah – ubah sesuai dengan perkembangan zaman membuat Indonesia melakukan berbagai manuver politik luar negeri yang tidak lepas dari koridor dasar diplomasi, kepentingan nasional tetap menjadi kepentingan yang harus dilindungi sesuai dengan UUD 1945.

---

<sup>32</sup> Kunjungan Kenegaraan PM Thailand di Istana Presiden, 11 Februari 2009.

Surya Yudha Regif : Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Thailand Pasca Kudeta Militer Thailand Pada Tahun 2006 Dalam Ruang Lingkup Asean, 2009.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dari Bab – Bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Politik Luar Negeri Bebas dan Aktif adalah politik luar negeri yang pada hakikatnya bukan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri secara apriori pada satu kekuatan dunia secara aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa dan permasalahan dunia lainnya, demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Yang dimaksud dengan diabdikan untuk “kepentingan nasional” adalah politik luar negeri yang dilakukan guna mendukung terwujudnya tujuan nasional sebagaimana tersebut di dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945.
2. Peristiwa Kudeta Militer Thailand yang terjadi berulang kali merupakan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan rakyat Thailand kepada salah satu penguasa dan konflik antar elit juga mempengaruhi hal tersebut, dan militer digunakan sebagai eksekutor pelaksanaan karena militer dianggap sebagai perintis modernisasi yang bersifat revolusioner.
3. Pola budaya masyarakat dan peranan raja dalam politik Thailand terkait

erat dengan fondasi dari politik Thailand. Antara lain :

1. Otoritarianisme yakni budaya politik yang ada di Thailand cenderung mengarah pada otoritarianisme dimana kepemimpinan dipandang sebagai representasi dari dewa sehingga pelaksanaan perintah nyaris tanpa celah untuk dikritisi. Terlebih ini didukung dengan budaya patriakal dan paternalistik yang cenderung mengagungkan pemimpin sebagai “father” dalam keluarga yang punya wewenang dan kekuasaan atas keluarganya.
2. Patron Klien yakni kaum elit lebih mengedepankan kepentingan kelompoknya sendiri dari pada kepentingan untuk melayani rakyat. Sehingga karakter elit lebih pada “tuan yang diagungkan” dari pada “servant of people”. Hal ini berdampak pada hubungan antar elit atas kelompoknya lebih kuat daripada dengan rakyat.
3. Personalisme yakni hubungan personal lebih penting dalam politik Thailand. Begitu pula fungsi seorang tokoh akan sangat menentukan garis kebijakan politik karena orang Thailand yang pragmatis lebih melihat figur tokoh daripada ideologi ataupun latarbelakang partai.
4. Hirarkis yakni orang Thailand lebih mementingkan tingkatan status daripada pencapaian seseorang. Senioritas, strata sosial, kekayaan, menjadi faktor utama daripada prestasi seseorang. Hal ini kemudian yang mengarahkan masyarakat Thailand pada masyarakat yang unik.
5. Tradisionalisme yakni masyarakat Thailand masih memegang kuat kepercayaan mistis dan tahayul serta kepercayaan pada nenek moyang.



Hal ini membuat irasionalitas menjadi hal yang umum terjadi dalam menghadapi kehidupan (sifat konservatif).

6. Pasivitas yakni sifat tradisional dan percaya pada adanya hirarki serta takdir membuat masyarakat Thailand menjadi pasif dan tidak memiliki interest terhadap proses dan partisipasi politik.
7. Cinta Damai yakni hal ini tak lepas dari pengaruh agama Budha yang dianut orang Thailand yang mengajarkan ajaran-ajaran cinta dan damai. Sehingga mereka lebih memilih untuk mengalah dalam rangka mencapai kedamaian bersama daripada konfrontasi yang berdampak pada ketidakdamiaan. Sehingga tak heran jika terjadi kudeta militer tidak sampai terjadi peristiwa berdarah. Karena selain peran Raja yang berpengaruh terhadap legitimasi kudeta tersebut, peran agama Budha yang cinta damai juga tak kalah pengaruhnya terhadap way of life masyarakat Thai.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat dilihat bahwa demokrasi yang ada di Thailand akan selalu mengalami dan menghadapi two face of dilemma dan binarry opposition, yaitu di satu sisi nilai demokrasi berusaha diterapkan dan dijalankan dengan sepenuh hati namun disisi lain ada nilai-nilai tradisional yang berbenturan dengan paham demokrasi.

4. Kestabilan Kawasan ASEAN sangat dipengaruhi oleh para negara anggotanya terutama negara – negara yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang cukup baik. Sementara kestabilan politik di Thailand

berarti kestabilan juga bagi kawasan, baik itu kawasan regional maupun

internasional. Pentingnya hubungan yang baik antara negara – negara se-kawasan menciptakan politik luar negeri yang produktif hingga dapat membantu permasalahan yang rumit. Fenomena yang terjadi di Thailand bersinggungan dengan apa yang telah diratifikasi dalam piagam ASEAN, Indonesia yang memiliki peranan penting di kawasan Asia Tenggara menyikapi keadaan ini dalam bentuk politik luar negeri diminta atau tidak oleh negara – negara yang bersangkutan.

5. Manfaat hubungan se-kawasan dapat menciptakan kemajuan baik di bidang politik, ekonomi, budaya, sosial, pertahanan dan keamanan. Semakin kuatnya konsistensi kawasan menjaga kekompakan maka dapat mencegah bentuk kekuatan yang ingin mendapatkan keuntungan dari konflik negara – negara ASEAN bila itu terjadi. Seiring dengan perkembangan, hubungan yang sangat baik dengan Thailand menjadikan Indonesia adalah mitra negara yang bisa dipercayai satu dengan yang lain dalam memecahkan permasalahan politik dan juga berbagai permasalahan yang menjadi prioritas kerjasama kedua negara.

6. Dampak Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Thailand bagi kepentingan Indonesia sendiri yakni :

1. Terjaganya kekompakan ASEAN yang berimplikasi pada kemajuan politik dan ekonomi kawasan.
2. Indonesia sebagai barometer demokrasi di negara Asia Tenggara.
3. Mempererat hubungan dalam bidang ekonomi khususnya yang berorientasi pada investasi dan pembukaan lapangan pekerjaan di

kedua negara.

4. Terbentuknya kepercayaan internasional terhadap Indonesia dalam penerapan kebijakan luar negeri yang efektif dan damai serta tidak terlalu mencampuri urusan dalam negeri negara lain.

## **B. SARAN**

Sistem Politik Luar Negeri Indonesia yang menganut Bebas dan Aktif menjadikan Indonesia negara yang bebas menjalankan politik internasionalnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun dengan tidak melepaskan kepentingan nasional, negara – negara di ASEAN memiliki sistem politik demokrasi yang berbeda – beda namun tujuan tetap sama. Seperti di Thailand, kondisi yang terjadi sering berulang – ulang namun Indonesia tetap mempercayakan bahwa Thailand dapat mengatasi keadaan tersebut. Jika keadaan dapat mengganggu kepentingan nasional Indonesia maka perlu adanya tindakan yang tidak berlebihan tapi tetap pada koridor demokrasi dan aturan main internasional untuk menekan negara yang bersangkutan. Dapat dipahami negara – negara di dunia memiliki berbagai macam demokrasi.

Oleh karena itu, merujuk pada kaum postmodernis, nilai-nilai demokrasi pada hakikatnya bisa diterapkan sesuai dengan tata nilai dan budaya yang ada di Thailand sendiri, jadi *Demokrasi ala Thailand*. Karena, pembangunan politik dan sosial suatu bangsa bisa jadi sama, yaitu ingin mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan madani, namun wujud untuk mencapainya berbeda. Sehingga nilai terbaik bagi Thailand sebenarnya bukanlah nilai Demokrasi sesuai dengan standar Barat tetapi dapat diadaptasi dan dimodifikasi dengan nilai-nilai dan tradisi Thai yang pada

akhirnya akan tercipta rezim demokrasi sesuai dengan social-character masyarakat Thai. Bila itu tercapai maka tidaklah suatu hal yang mustahil jika kondisi politik akan stabil tanpa ada persaingan antar elit.

Hal yang perlu dilihat lagi adalah untuk membangun rezim demokrasi ala Thailand seharusnya ketiga elit yang bertentangan tersebut harus menyadari akan nilai-nilai Thai sehingga mereka dapat berkumpul bersama dengan raja dan rakyatnya untuk membentuk semacam konsensus nasional bagi pembangunan state building yang diinginkan.

Pelajaran yang bisa dipetik di Indonesia , atas kudeta militer terhadap pemerintahan hasil demokrasi antara lain :

- (1). Kepentingan institusional militer untuk mempertahankan akses ekonomi dan politiknya selalu harus dikontrol oleh sipil.
- (2). Militer di mana saja bisa menggunakan dalih ‘kepentingan nasional’ untuk mengubur demokrasi untuk itu perlu perputaran rotasi kepemimpinan dalam tubuh militer agar terhindar dari satu bentuk fanatisme ketokohan.
- (3). Militer di Thailand, tidak akan mampu untuk memutar balik jarum jam kepada zaman diktator macam Phibun, Sarit, Thanom, atau Kriangsak. . Dengan kata lain, walaupun militer mengambil langkah sebagaimana di Thailand, kediktatoran model tempo dulu akan sulit dipertahankan dan harus bernegosiasi dengan berbagai kekuatan politik. Kekuatan politik progresif yang mempunyai basis akar rumput kuat, sangat sulit ikut dalam proses negosiasi dan kontestasi tersebut. Jadi, politik dan demokrasi tetap menjadi mainan elite.

sikap saling menghormati kepentingan yang mendasar atas persahabatan dan

kerja sama, dan mematuhi prinsip-prinsip demokrasi, aturan hukum dan tata pemerintahan yang baik, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.

Terkait dengan situasi politik di Thailand, Jika menghubungkan ASEAN Charter dengan paradigma hubungan internasional maka ASEAN Charter adalah suatu bentuk kerjasama negara-negara yang berada dalam suatu kawasan dengan tujuan agar tingkat kerjasama negara-negara yang berada dalam suatu kawasan bisa menjadi lebih baik. Walaupun berada dalam suatu kawasan yang terikat pada sebuah organisasi regional antara satu negara dengan negara lain dilarang keras untuk mencampuri urusan dalam negara satu dengan negara yang lain, apalagi sampai terjadi intervensi seperti terdapat dalam piagam PBB pasal 1 ayat 2.

Dalam ASEAN ada negara yang tergolong dalam negara maju dan negara berkembang, contohnya negara Singapura dan negara berkembang seperti Thailand, Indonesia, Laos, Vietnam dan lain sebagainya. Disini walaupun Singapura sebagai salah satu negara maju tidak boleh mengintervensi baik secara ekonomi, politik atau dengan alasan apapun karena intervensi adalah salah satu bentuk penjajahan. Walaupun demikian dengan mengingat adanya kesepakatan membentuk ASEAN community 2020 dibutuhkan konsistensi dari semua anggota ASEAN agar tercapai apa yang disepakati bersama.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Azwar, Saifuddin., *Metode Penelitian.*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar., 1998.

Best, Steven., *Teori Postmodern ( Interogasi Kritis )*., Malang; Boyan Publishing, 2003.

Bona .S, Frans., *Ilmu Politik Internasional.*, Jakarta; Ghalia Indonesia., 1984.

Gill, Ranjit., *ASEAN.*, Jakarta ; PT. Gramedia., 1988.

Holsti K.J., *Politik Internasional.*, Edisi keempat Jilid I ., Jakarta; Erlangga., 1988.

Kusumaatmadja, mochtar., *Politik Luar Negeri Indonesia dan Pelaksanaannya Dewasa Ini.*, Bandung; Alumni., 1983.

Mac Andrews, Colin., *Masalah-masalah pembangunan Politik*”., Yogyakarta: Gajah Mada University press., 1988.

Nawawi, Hadari., *Metode Penelitian Bidang Sosial.*, Yogyakarta; Gajah Mada University Press., 1995.

Organski, A.F.K., *Tahap – Tahap Perkembangan Politik.*, Jakarta ; Akademika Presindo., 1985.

Pakpahan, Mukhtar., *Ilmu Negara dan Politik.*, Jakarta; Bumi Intitama Sejahtera., 2006.

Singarimbun, M., *Metodologi penelitian survey.*, Jakarta; LP3ES., 1995.

Soeprapto, R., *Hubungan Internasional.*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Permata., 1997.

Sorensen, Georg., *Pengantar Studi Hubungan Internasional.*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar., 2005.

Surya Yudha Regif : *Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Thailand Pasca Kudeta Militer Thailand Pada Tahun 2006 Dalam Ruang Lingkup Asean*, 2009.

Yusuf,Suffri.,Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri.,Jakarta;Sinar Harapan.,1989.

### **SURAT KABAR**

Seputar Indonesia., Kolom Opini., *Pasca Kemelut Politik Thailand* .,M.Alfan Alfian.,17 Desember 2008.

### **UNDANG - UNDANG**

Undang- Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

### **INTERNET**

Google ; Coen Husain Pontoh dari IndoProgress mewawancarai DR. Vedi Renandi Hadiz, associate professor di Department of Sociology, National University of Singapore

Google ; Harian Republika, ( di akses Senin 13 April 2009 )

Google ; MILITER DAN BISNIS : SEBUAH ANALISIS, Indria Samego ( di akses 20 Juni 2008 )

Google; Pasca Kudeta Militer Thailand dan Pengaruhnya bagi ASEAN (di akses tanggal 20 Juni 2008)